

BAB II

KAJIAN TEORETIK

Bab kedua ini penulis sebut dengan kajian teoretik yang dikenal juga dengan istilah kerangka teoritik; isinya membahas tentang teori-teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sehingga pada bab ini, penulis akan menguraikan teori mengenai manajemen pendidikan, pendidikan Islam, dan manajemen pendidikan Islam. Tiga pokok pembahasan tersebut menjadi penting untuk didalami, sebab memandang pada fokus penelitian yakni *Moeslim National Onderwijs* secara jelas dan nyata berhubungan dan terkait erat dengan manajemen pendidikan Islam. Singkatnya, mengenai ketiga pokok pembahasan ini penulis sebut sebagai kerangka teori; yang dikandung maksud adalah teori-teori umum yang penulis anggap memiliki kesepahaman dengan fokus penelitian.

Pada bab ini diuraikan pula gambaran pendidikan Islam kolonial dan sekarang. Dilanjutkan pembahasan tentang hasil penelitian yang relevan; hal ini sebagai penguat dan bukti kongkrit bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah ada kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Dan di akhiri dengan kerangka teori; yakni sebagai acuan penelaahan tesis.

A. Manajemen Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Pendidikan

Istilah manajemen yang penulis gunakan pada konteks penelitian ini pada substansinya adalah sama dengan istilah manajemen. Sehingga pemaparan selanjutnya mengenai manajemen pendidikan disini penulis

banyak menggunakan referensi dan teori-teori manajemen. Adapun penggunaan istilah baik manajemen maupun manajemen, disini dikandung maksud oleh penulis sama maknanya.

Sebelum kita simpulkan pengertian manajemen pendidikan, ada baiknya penulis paparkan terlebih dahulu dari pengertian manajemen. Dimana asal katanya, manajemen atau manajemen diawali dari kata *manus* yang artinya *tangan*; ini berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada.²⁰

Begitu juga pengertian manajemen dari beberapa pendapat; diantaranya:²¹

- a. Enciclopedia of The Social Sciences
Di dalam Enciclopedia of The Social Sciences, manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi.
- b. Mary Parker Follet
Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
- c. Thomas H. Nelson
Menurut Nelson, manajemen perusahaan adalah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan.
- d. G.R. Terry
Menurut Terry, manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

²⁰ Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan: Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran Yang Efektif* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 2.

²¹ Agus Sabardi, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), h. 3-4.

e. James A.F. Stoner

Menurut Stoner, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya (usaha-usaha) anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

f. Oei Liang Lie

Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber-daya manusia dan alam, terutama sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada salah satu penelitiannya R. Wayne Mondy and Robert M. Noe menyatakan bahawa:

Consequently, managers at all levels must concern themselves with human resource management at least to some extent. Basically, managers get things done through the efforts of others, which requires effective human resource management. In a manufacturing firm, for instance, the production manager meshes physical and human resource to produce goods in sufficient numbers and quality; the marketing manager work through sales representatives to sell the firm's products; and the finance manager obtains capital and manages investments to ensure sufficient operating funds. These individuals are called "line" managers because they have formal authority and responsibility for achieving the firm's primary objectives.²²

Sedangkan pengertian pendidikan sendiri berasal dari kata educare yang artinya membawa keluar yang tersimpan. Sebagaimana pula berikut dipaparkan pendapat oleh:²³

a. Jhon Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia, dengan kata lain sebagai usaha pengembangan potensi individu peserta didik.

²² R. Wayne Mondy and Robert M. Noe, *Human Resource Management* (United States of America: Allyn and Bacon, 1993), h. 4.

²³ Rohman dan Amri, *Manajemen Pendidikan...*, h. 3.

- b. Ivan Illich
Pendidikan adalah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dalam sepanjang hidup.
- c. Kleis (1974)
Adalah sejumlah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami, pengalaman terjadi karena adanya interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya, interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia, dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi seseorang atau kelompok di dalam lingkungannya.
- d. The International Standart Clasifications of Educations (UNESCO, 1975)
Pendidikan adalah komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan belajar.
- e. Driyarkarya
Pendidikan adalah hidup bersama dalam satuan tri tunggal ayah, ibu, anak, dimana terjadi pelaksanaan nilai dengan proses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia seutuhnya.

Adapun pengertian pendidikan di Indonesia sendiri secara kenegaraan dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan definisinya bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.²⁴

Memandanag pada kedua pengertian manajemen dan pendidikan di atas, maka beberapa ahli mendefinisikan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:²⁵

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya* pada Bab I pasal 1 ayat (1) (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h. 2.

²⁵ Rohman dan Amri, *Manajemen Pendidikan...*, h. 4-5.

- a. Tony Bush (1986-2003)
Manajemen pendidikan adalah bidang studi dan praktik terkait dengan operasi organisasi pendidikan.
- b. Made Pidarta (1988:4)
Aktivitas memadukan sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. H.A.R. Tilaar (2006)
Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang mengimplikasikan adanya perencanaan atau rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya.
- d. Hasbullah (2006)
Manajemen pendidikan adalah merupakan suatu proses yang merupakan daur (siklus) penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan pemantauan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya, oleh karena itu manajemen pendidikan juga merupakan usaha untuk melakukan manajemen sistem pendidikan.
- e. Veithzal Rivai dan Silviana Murni (2008)
Manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk mengkoordinasi berbagai sumberdaya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan sasaran pendidikan.
- f. Engkoswara dan Ann Komariah (2010: 88)
Suatu penetapan dibidang arapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkwalitas.

Memang banyak terdapat berbagai pengertian mengenai manajemen atau manajemen pendidikan, namun disini menjadi jelas bahwa definisi manajemen pendidikan menurut pandangan penulis adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, penggunaan sumberdaya organisasi yang kesemuanya berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan (yakni mencerdaskan pengetahuan dan prilaku manusia).

2. Tujuan Manajemen Pendidikan

Tujuan merupakan bagian utama dari sebuah proses apapun dan oleh siapapun; termasuk juga dalam dunia pendidikan. Sebagai sebuah organisasi maka dibutuhkan manajemen yang utamanya memuat tiga hal penting, yaitu: (1) pencapaian tujuan secara efektif dan efisien; (2) menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menentukan skala *prioritas*; dan (3) mempunyai keunggulan daya saing (*competitive advantages*) dalam menghadapi persaingan global.²⁶

Pandangan dari Sondang P. Siagian tentang tujuan manajemen mengacu pada pendapat bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh umat manusia di masa depan adalah untuk menciptakan organisasi yang semakin beraneka ragam tetapi sekaligus menuntut manajemen yang semakin efisien, efektif dan produktif. Yang sekemuaannya itu dirangkumnya kedalam empat golongan yaitu: (1) tujuan masyarakat sebagai keseluruhan; (2) tujuan organisasi yang bersangkutan; (3) tujuan fungsional dalam arti tujuan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi; dan (4) tujuan pribadi para anggota organisasi.²⁷

Jika ditinjau dari sisi manajemen strategis, tujuan utamanya adalah cara bagi sekolah dan perguruan tinggi untuk merencanakan dan *manage*, memperbaiki, atau menambah nilai dari tahun ke tahun terhadap pendidikan remaja dan penyiapan untuk kehidupan di masa mendatang.

Yang sekemuaannya itu dapat ditilik dari segi konsep efektifitas, konsep

²⁶ Sabardi, *Pengantar Manajemen...*, h. 3.

²⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 25-26.

perbaikan, dan konsep mutu.²⁸ Dari ketiga konsep tersebut, tujuan dari manajemen pendidikan memiliki kelebihan masing-masing.

Sedangkan ditinjau dari aspek manajemen kinerjanya, maka dalam pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan suatu budaya di mana individu dan kelompok bertanggung jawab atas kelanjutan peningkatan proses bisnis dan peningkatan keterampilan dan kontribusi mereka sendiri.²⁹

Maka, tujuan dari manajemen pendidikan yang perlu saat ini adalah ditinjau dari segi fungsinya. Dimana dalam proses pelaksanaannya, manajemen pendidikan mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan dari perencanaan sampai dengan penilaian. Yang mana fungsi administrasi ini meliputi: *fungsi organik*; yaitu semua yang mutlak harus dikerjakan oleh administrator atau manajer, dan *fungsi pelengkap*; yaitu semua fungsi meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan, karena pelaksanaan fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tujuan yang efisien, ekonomis, dan efektif.³⁰

Dan secara rinci, tujuan manajemen atau manajemen pendidikan meliputi:

- a. Produktivitas, yaitu perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh (*output*) dengan jumlah sumber yang dipergunakan (*input*);

²⁸Lihat lengkapnya dalam Tony Bush and Marianne Coleman, *Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan* (terj. Fahrurrozi), (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 150-190.

²⁹ Michael Armstrong, *Performance Management* (terj. Toni Setiawan), (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2004), h. 30. Dijelaskan pula secara khusus dari tujuan manajemen ini adalah untuk memberikan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran sebagaimana diekspresikan dalam target dan standar kinerja pengertian bersama tentang sasaran dan peranan yang harus dimainkan manajer dan individu dalam mencapai sasaran tersebut meningkat. *Ibid.*, h. 31.

³⁰ Rohman dan Amri, *Manajemen Pendidikan...*, h. 58.

- b. Kualitas; yaitu menunjuk kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (*products*) dan atau jasa (*service*) tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya;
- c. Efektivitas; yaitu ukuran keberhasilan tujuan organisasi; dan
- d. Efisiensi; yaitu berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan betul. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal.³¹

3. Manfaat Manajemen Pendidikan

Dalam pandangan kelompok strategik, berpendapat bahwa manajemen atau manajemen diperlukan oleh karena untuk membantu dalam melakukan pilihan strategi bisnis dengan pendekatan yang logis, rasional, dan sistematis. Dan ini akan berfungsi sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, eksekutif, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sehingga kepada pihak yang memiliki kepentingan langsung dapat lebih memahami peluang dan tantangan bisnis yang akan dihadapi dengan sikap yang proaktif bukan sekedar reaktif. Dan diharapkan tidak hanya memberikan respon tetapi juga mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuknya. Bahkan lebih jauh, diharapkan tidak terjebak pada sikap anti perubahan yang disebabkan oleh perumusan strategi yang hanya dilandasi oleh kebiasaan, mengikuti pemimpin, berfikir *incre-mental* dan *gradual*.³²

³¹ *Ibid*, h. 89.

³² Suwarno Muhammad, *Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 17-18.

Memandang perihal tersebut, menjadi penting bagi dunia pendidikan adanya manajemen. Hal ini akan bermanfaat secara menyeluruh, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, bahkan tujuan pendidikan itu sendiri yang tertuang dalam muatan kurikulum bagi pendidik maupun peserta didiknya.

Manfaat manajemen pendidikan saat ini juga tak lepas dari pengaruh konsep pendidikan yang pada sejarah lama dikelola oleh pusat (sentralisasi) kemudian kini dikembalikan kepada daerah. Dan dengan pola otonomi, maka sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional terbawah akan merasakan betul asas manfaat adanya manajemen pendidikan. Dimana setiap lembaga pendidikan akan berupaya mengelolan sedemikian rupa agar tujuan dari sekolah tersebut tercapai. Demikian pula kewenangan sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan pembelajaran akan lebih mudah dan cakap diterapkan.³³ Dan tentunya, masyarakat pun akan mudah mengakses dan turut serta dalam mencapai segala tujuan yang ada pada sekolahan tersebut.

4. Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan

Berbicara manajemen, tentu tak dapat lepas dari fungsi-fungsinya.

Maka guna memberi keluasan pengetahuan, berikut diuraikan mengenai

³³ Rohman dan Amri, *Manajemen Pendidikan...*, h. 76-77.

fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Diantaranya pendapat Husaini Usman yang membagi kedalam 4 (empat) fungsi manajemen atau manajemen; yaitu:

a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian kerja, dan kepuasan kerja), d) pengendalian meliputi pemantauan (*monitoring*), penilaian, dan pelaporan.³⁴

Sedangkan Fidler membagi fungsi manajemen kepada: a) *planning*, b) *organizing*, c) *staffing*, d) *resourcing*, e) *monitoring* dan *controlling*, f) *liasing* dan *negotiating*, serta g) *communicating*.³⁵

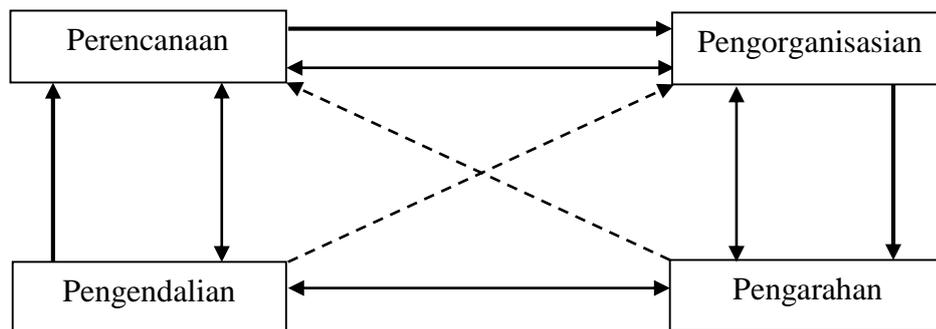
Pendidikan tentunya membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan bentuk pengawasan dimana keempatnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, meskipun dalam implikasinya dikerjakan oleh unit-unit yang berbeda. Dan keempat hal itu disebut sebagai proses manajemen. Berkait kata 'proses' ditambahkan guna memberikan arti kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer/ pemimpin pada semua tingkatan.

Visualisasi terhadap proses tersebut, tergambar sebagai berikut:³⁶

³⁴ Lihat Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 19.

³⁵ *Ibid*, h. 19.

³⁶ M. Mamduh Hanafi, *Manajemen* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), h. 8-9.



Keterangan:

- a. Tanda panah tebah: menunjukkan urutan kegiatan secara teoritis yang dimulai dari perencanaan, kemudian diakhiri pada pengendalian, yang kemudian berputar kembali pada perencanaan.
- b. Tanda panah putus-putus: menunjukkan urutan yang lebih realistis, yang terjadi di praktik manajemen.

Demikian halnya, Nanang Fattah mengatakan bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/ pemimpin, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.³⁷

The Liang Gie menamakan langkah-langkah tersebut sebagai fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi: perencanaan (*planning*), pembuatan keputusan (*decision making*), pembimbing (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengontrolan (*controlling*), dan

³⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 15.

penyempurnaan (*improving*).³⁸ Menurut George R. Terry dalam *Principles of Management* mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan mengawasi (*controlling*).³⁹

Berdasar pada beberapa pendapat di atas, fungsi dan kegiatan manajemen dalam pendidikan terjabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam proses manajemen yang akan membahas tentang apa yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan perlu persiapan dan dipikirkan secara intensif. Demikian halnya pendapat Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa “perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal”.⁴⁰

Kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan merupakan definisi perencanaan yang mengandung unsur-unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.⁴¹

³⁸ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern* (Yogyakarta: Nurcahyo, 1983), h. 61.

³⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), h. 105.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Adtya Media, 2008), h. 9.

⁴¹ Usman, *Manajemen: Teori...*, h. 77.

Dalam perencanaan kegiatan dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penentuan tujuan, penegakkan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.⁴²

Maka perencanaan merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dengan menentukan siapa yang akan terlibat, metode apa yang akan digunakan, dan kapan waktu menghindari penyimpangan dari tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dan perencanaan juga merupakan suatu proses berfikir yang sistematis dalam menetapkan apa, bagaimana, dan kapan kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang secara sistematis proses berfikir tersebut dilakukan secara bertahap, yakni:⁴³

- 1) Tujuan pendidikan yang akan dicapai harus sudah tergambar secara jelas atau operasional;
- 2) Situasi dan kondisi harus dipelajari (hal ini mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, kendala dan hambatan yang mungkin timbul, upaya yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangnya); analisa seperti itu dapat dilaksanakan apabila data dan informasi itu

⁴² Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 103.

⁴³ Lihat Soetopo, *Manajemen...*, h. 17 dalam, (Tesis) (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), h. 44-45.

dapat dipercayakan dan kemampuan menganalisis ikut menentukan kualitas rencana yang akan disusun;

- 3) Berdasarkan hasil analisis tersebut perencanaan harus dapat menemukan berbagai alternatif cara atau metode atau strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- 4) Perencanaan harus dapat menentukan alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Bagaimanapun hasil analisisnya keputusan harus diambil, cara, metode, atau strategi mana yang berdaya guna dan berhasil guna dalam proses pencapaian tujuan;
- 5) Penyusunan rencana yang meliputi: tujuan yang akan dicapai, metode atau cara atau strategi yang digunakan, sarana dan prasarana yang diperlukan, waktu pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan alat untuk mengevaluasi hasil kegiatannya.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pendidikan meliputi segenap kegiatan perumusan dan penetapan tujuan pendidikan, analisis situasi dan kondisi, perumusan masalah, indentifikasi hambatan, eksplorasi alternatif pemecahan masalah dan kegiatan pencapaian tujuan dan terakhir menetapkan kriteria keberhasilan sebagai ukuran tercapainya tujuan yang sudah direncanakan.

Adapun dalam pencapaian tujuan suatu perencanaan kiranya perlu untuk memperhatikan azas-azas sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h. 45-46.

- 1) Azas komprehensif (menyeluruh) yaitu pemikiran yang berwawasan menyeluruh dalam menganalisis situasi, kondisi dan sumber daya yang ada, kemudian memilih metode atau cara yang akan dipakai, menentukan sarana, dan waktu;
- 2) Azas integratif (keterpaduan) yaitu suatu pemikiran atau wawasan yang memperhatikan pengaruh atau keterikatan faktor-faktor lain non pendidikan;
- 3) Azas kontinuitas (kesinambungan) yaitu kesinambungan rencana yang dibuat dengan tingkat situasi dan kondisi yang sudah direncanakan;
- 4) Azas praktis (visibilitas) yaitu suatu pemikiran yang mengutamakan segi praktisnya suatu rencana yang simpel namun tetap mengenai sasaran;
- 5) Azas fleksibel (lentur) yaitu menyusun suatu rencana yang mudah disesuaikan dengan perubahan atau perkembangan situasi dan kondisi yang ada, tetapi tanpa mengurangi maksud yang hendak dicapai;
- 6) Azas berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) yaitu suatu rencana yang mengacu secara tepat kepada tercapainya tujuan yang diharapkan, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber daya secara minimal tetapi hasilnya maksimal.

Demikian halnya pernyataan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah perencanaan, maka diperlukan beberapa asas-asas berikut:⁴⁵

- 1) Asas pencapaian tujuan;
- 2) Asas dukungan data yang akurat;
- 3) Asas menyeluruh (*comprehensif* dan *integrated*); dan
- 4) Asas praktis.

Dengan demikian, manajer atau perencana dalam penyusunan perencanaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas tersebut, hal ini menjadi sangat penting karena dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebuah perencanaan tentu memiliki tujuan. Maka dalam konsep manajemen, Husaini Usman memaparkan bahwa tujuan dari perencanaan adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Standar pengawasan yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan;
- 2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu pekerjaan;
- 3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantitasnya;
- 4) Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan;

⁴⁵ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 26-27.

⁴⁶ Lihat Usman, *Manajemen: Teori...*, h. 76.

- 5) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat tenaga, biaya dan waktu;
- 6) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan;
- 7) Menyerasikan dan memadukan beberapa sub-kegiatan;
- 8) Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui; dan
- 9) Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa manfaat perencanaan adalah:⁴⁷

- 1) Standar pelaksanaan dan pengawasan;
- 2) Pemilihan berbagai alternatif terbaik;
- 3) Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan;
- 4) Menghemat pemanfaatan organisasi;
- 5) Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan;
- 6) Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait;
- 7) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti; dan
- 8) Meningkatkan kinerja.

Adapun klasifikasi perencanaan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang secara khusus perencanaan ditinjau dari sudut waktunya dapat diklasifikasikan menjadi: (1) rencana jangka panjang: 10-25 tahun, (2) rencana jangka menengah: 5-9 tahun, (3) rencana jangka pendek: 1-4 tahun. Sedang ditinjau dari telaaahnya

⁴⁷ *Ibid*, h. 76-77.

(pemikirannya) maka perencanaan diklasifikasikan menjadi: (1) perencanaan *strategic* (kebijaksanaan), (2) perencanaan *managerial* (pengarahan pelaksanaan), (3) perencanaan *operasional* (pelaksanaan teknis).⁴⁸

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Tercapainya tujuan yang sama, maka proses kerjasama sekelompok manusia dilakukan dengan berbagai jenis kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat terpadu, maka kegiatan itu perlu diorganisir. Karena hakekatnya pengorganisasian mencakup menstrukturkan bagian-bagian, membagi-bagi fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan menentukan mekanisme kerja.

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antara personalia, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.⁴⁹

Sedang Handoko memaparkan pengorganisasian adalah:⁵⁰

- 1) Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi;

⁴⁸Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 93.

⁴⁹ Dalam Mulyono, *Manajemen Administrasi...*, h. 27.

⁵⁰ Usman, *Manajemen: Teori...*, h. 141.

- 2) Proses perencanaan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan;
- 3) Penugasan tanggungjawab tertentu;
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan mengatur dan mengalokasikan semua sumber daya dan wewenang kepada orang-orang yang dianggap berkompeten untuk mengefektifkan pencapaian tujuan suatu organisasi.

Maka paling tidak ada tiga aktivitas penting yang harus dilakukan dalam pengorganisasian, yaitu: (1) pembentukan bagian-bagian yang dirancang dalam bentuk struktur, (2) adanya deskripsi pekerjaan (*job description*) dan analisis tugas (*analysis of duties*), dan (3) pengaturan mekanisme kerja yang mengatur hubungan antara kaitan bagian-bagian.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang mau dan dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Penggerakan dimaksudkan agar tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk mampu menggerakkan orang dengan baik, maka dibutuhkan kemampuan atau seni menggerakkan orang lain; yang dalam hal ini dikenal dengan istilah kepemimpinan (*leadership*).

Adapun fungsi penggerakan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pengarahan (*directing*); yakni setiap usaha yang dilaksanakan untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana melaksanakan fungsi dan tugas, terutama yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan yang diberikan dalam menghadapi berbagai kemungkinan masalah yang ada. Petunjuk dan penjelasan tersebut diperlukan agar para pelaksana mempunyai persepsi dan wawasan yang tepat, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak mengalami hambatan atau terjadi penyimpangan dari arah kebijakan yang telah digariskan;
- 2) Koordinasi (*coordinating*); yakni upaya menyatukan atau menyeimbangkan gerak langkah pelaksanaan, fungsi dan tugas dari berbagai unit pelaksana, sehingga pelaksanaannya berjalan harmonis, lancar, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Hubungan kerjasama yang harmonis diperoleh apabila keterkaitan kerja unit-unit kerja dan kesadaran akan kebersamaan yang dapat menumbuhkan sikap perilaku saling bahu membahu;
- 3) Dorongan (*motivating*); adalah motivasi kerja yang diperlukan untuk meningkatkan semangat kerja. Kemampuan dan keterampilan kerja yang tinggi tidak dengan sendirinya

menghasilkan produktivitas yang tinggi. Hal tersebut perlu disertai dengan kemauan atau semangat kerja yang tinggi, sehingga keaktifitasan kerja para pelaksana berkembang. Mereka tidak hanya bekerja bila ada perintah saja, tetapi mereka akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya. Dan memimpin (*leading*) berarti menggerakkan orang lain (pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, dan siswa) agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Maka, kepala sekolah harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan atau situasi dan kondisi. Keefektifan gaya kepemimpinan tersebut terletak pada relevansi penggunaan gaya kepemimpinan terhadap situasi dan kondisinya.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pemaknaan pengawasan mengandung berbagai ragam arti, seperti inspeksi, kontrol dan evaluasi dalam proses manajemen. Namun pada hakekatnya pengawasan adalah aktivitas dalam usaha mengendalikan, menilai dan mengembangkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesalahan, kegagalan, dan penyimpangan yang terjadi dilapangan perlu diperbaiki dan dicegah jangan sampai terulang kembali. Selain itu juga untuk menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu, tentunya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Begitu juga pendapat Mondy yang mengatakan bahwa “*controlling is the process of comparing actual performance with standards and taking any necessary corrective action*”; yakni proses membandingkan untuk kerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan proses aktifitas yang berusaha mengecek, menilai, dan mengoreksi dengan kriteria pengecekan seperti rencana, perintah, dan prinsip dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengembangkan kegiatan organisasi. Yang secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan adalah *preventif* dan *represif*. Yakni *preventif* mengacu pada pencegahan timbulnya penyimpangan pelaksanaan kerja organisasi dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya; dan *represif* merupakan usaha mencapai ketata azasan dan kedisiplinan menjalankan setiap aktivitas agar memiliki kepastian hukum dan menetapkan perbaikan jika terdapat penyimpangan. Sehingga perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat; bagaikan dua sisi mata uang yang sama “(*planning and controlling are the two sides of the same coin*)”. Hal ini membuktikan bahwa, tanpa

pengawasan, penyimpangan akan dapat terus berlangsung dan semakin parah serta akan sulit untuk dapat mengatasinya. Sebaliknya, pengawasan yang efektif akan menjamin tercapainya tujuan yang telah lama direncanakan.

Agar pelaksanaan pengawasan berjalan baik, perlu kiranya dalam manajemen memperhatikan prinsip pengawasan, antara lain:⁵¹

- 1) Prinsip organisasi, artinya pengawasan harus dilaksanakan dalam rangka struktur organisasi yang melingkupinya. Misalnya organisasi sekolah, pengawasan dilakukan terhadap jalannya organisasi intern sekolah dan hasil kontrol atau pengawasan itu dilaporkan kepada unit organisasi di atasnya.
- 2) Prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan atau kekurangan, kemudian dicari jalan pemecahan agar manajemen dapat berjalan sesuai dengan standar dan organisasi dapat mencapai tujuan.
- 3) Prinsip komunikasi, artinya pengawasan dilakukan untuk membina sistem kerjasama antara atasan dan bawahan, membina hubungan baik antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan manajemen organisasi.
- 4) Prinsip pencegahan, artinya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi.
- 5) Prinsip pengendalian, artinya pengawasan dilakukan agar semua proses manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya. Dalam hal ini prinsip efisiensi dan efektifitas dalam manajemen menjadi ukuran.
- 6) Prinsip obyektifitas, artinya pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata dilapangan, tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subyektif pengawas.
- 7) Prinsip kontinyuitas, artinya pengawasan dilakukan secara terus menerus, baik selama berlangsungnya proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan kerja. Dengan demikian pengawasan dilakukan terhadap proses dan hasil.

⁵¹Nuraini, *Manajemen Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Agama* (Tesis) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 63-64.

Singkatnya, keempat fungsi manajemen atau manajemen tersebut bagi penulis menjadi titik utama dalam menjalankan sebuah manajemen pendidikan; khususnya pendidikan Islam.

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Berbicara mengenai pendidikan, secara historis nyata-nyata telah ada sejak adanya peradaban makhluk hidup (terutama manusia).⁵² Dipertegas lagi mengenai pendidikan yang berasal dari kata (*rabba*) dituangkan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 24; yang berbunyi:⁵³

رَبِّ ارْحَمْنَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا...

Artinya : *Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.*

Arti pendidikan ditilik dari asal kata Yunani *educare* yang berarti membawa keluar yang tersimpan, untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tarbiyah* berasal dari kata *raba-yarbu* yang berarti mengembang, tumbuh.⁵⁴ Hal ini dipertegas oleh Zakiah Daradjat bahwa kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah *tarbiyah*, dengan kata kerja *rabba*. Kata “pengajaran” dalam bahasa Arabnya adalah *ta'lim*

⁵² *Ibid.*, h. 59.

⁵³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), h. 284.

⁵⁴ Rohman dan Amri, *Manajemen Pendidikan...*, h. 3. Dalam buku ini juga mencatat definisi pendidikan dari beberapa ahli, seperti Jhon Dewey, Ivan Illich, Kleis, The International Standar Clasifications of Edukations (UNESCO), Driyakarya, UU No. 20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Prayitno, Engkoswara dan Ann Komariah.

dengan kata kerja ‘*allama*. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya *tarbiyah wa ta’lim* sedangkan “pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah *tarbiyah Islamiyah*.⁵⁵

Pendidikan Islam berarti pembentukan pribadi manusia. Isi pribadi muslim itu adalah pengamalan sepenuhnya ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam ajaran Islam bertaqwa itu wajib, tetapi tidak mungkin bertaqwa itu tercapai kecuali dengan pendidikan, maka pendidikan itu juga wajib.⁵⁶ Sehingga menjadi sangat penting untuk menjadikan tujuan Islam tercapai memerlukan upaya pendidikan. Karena syari’at Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Dari sisi kacamata kita; bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dan di segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis.⁵⁷

Ditinjau dari segi kewajiban manusia untuk senantiasa belajar dan terus belajar (sepanjang hayat), diceritakan bahwa pada tahun 1996 *Commision on Education for the Twentynfirst Century* melaporkan kepada UNESCO bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai bangunan yang ditopang oleh empat pilar, yaitu: (1) *learning to know*, yang juga berarti *learning to learn*, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan dan untuk melakukan pembelajaran selanjutnya, (2) *learning to do*, yaitu belajar

⁵⁵ Daradjat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 25.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 17-18.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 25.

untuk memiliki kompetensi dasar dalam berhubungan dengan situasi dan tim kerja yang berbeda-beda, (3) *learning to life together*, yaitu belajar untuk mampu mengapresiasi dan mengamalkan kondisi saling ketergantungan, keanekaragaman, memahami dan perdamaian intern dan antar bangsa, dan (4) *learning to be*, yaitu belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki timbangan dan tanggungjawab pribadi.⁵⁸

Adapun Muhaimin meninjau dari aspek program dan praktik penyelenggaraannya, mengelompokkan pendidikan Islam kedalam lima jenis. *Pertama*, pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah, yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan sebagai pendidikan keagamaan. *Kedua*, pendidikan madrasah--yang saat ini disebut sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam--dan pendidikan lanjutannya, seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Kementerian Agama. *Ketiga*, pendidikan umum yang diselenggarakan oleh dan/atau berada dibawah naungan yayasan dan organisasi Islam. *Keempat*, pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. *Kelima*, pendidikan Islam dalam keluarga atau tempat-tempat ibadah, dan/atau forum-forum kajian keislaman,

⁵⁸ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 1.

majelis taklim, serta institusi-institusi lainnya yang saat ini digalakkan oleh masyarakat.⁵⁹

Dengan demikian, pendidikan Islam yang dikandung maksud penulis dalam makalah ini adalah segala yang mencakup pendidikan dan pengajaran Islam, yang meliputi kurikulum dan sumber daya manusia juga alam yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal untuk tercapainya tujuan dari pada pendidikan Islam itu sendiri termasuk terciptanya pelajar yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan berkeagamaan.

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Setiap masyarakat saat ini memandang dan bertumpu pada sendi-sendi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Apabila kita tidak pandai-pandai memanfaatkannya, bisa saja ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengganti keyakinan umat manusia menjadi bertuhan iptek dan diarahkan pada hedonisme dan materialisme. Kemampuan iptek harus diimbangi dengan pengembangan moral dan religi, oleh karena kemajuan iptek saja, dapat melunturkan kerendahan hati manusia dan menyuburkan keangkuhan dan keserakahan manusia akan kekuasaan yang tanpa batas.

Untuk itu, pendidikan Islam sendiri harus memiliki pondasi dasar yang kokoh dalam merancang dan melaksanakannya. Diantara dasar-dasar pendidikan Islam adalah al Qur'an, sunnah dan ijtihad.

⁵⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 9-10 sebagaimana dikutip Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 18-19.

Didalam al Qur'an sendiri telah dijelaskan pada Q.S. Shad ayat 29, Allah SWT berfirman:⁶⁰

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : *Kitab (al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.*

Sedang dalam sunnah di contohkan sebagaimana hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, yang artinya :

Dari Abu Hurairah dia berkata ketika Nabi SAW sedang duduk dalam sebuah majlis tengah membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki Badui lalu bertanya, "Kapan datang kehancuran (kiamat)?" Rasulullah terus saja berbicara; maka berkata sebagian kaum, beliau mendengar apa yang dia katakan, tetapi beliau tidak menyenangkannya. Sebagian lainnya berkata, beliau tidak mendengar (pertanyaan itu) sampai beliau rampung bicarannya. Beliau bersabda, "Dimana-tunjukkan kepada saya siapa yang bertanya kapan datangnya kebinasaan (kiamat)!" Dia berkata, "Saya wahai Rasulullah!". Rasulullah bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kebinasaan) kiamat!". Orang itupun bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Rasul menjawab, "Jika suatu urusan dipercayakan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kebinasaan".⁶¹

Sedangkan bentuk ijtihad manusia itu sendiri bermacam-macam hasilnya. Diantara hasil ijtihad manusia, khususnya mengenai pendidikan Islam di Indonesia dijelaskan Muhaimin sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai falsafah negara atau bangsa Indonesia. Jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka Pancasila bukan yang mengandung lima ide dasar melainkan

⁶⁰ Hatta, *Tafsir Qur'an...*, h. 273.

⁶¹ Muhammad Dailamy SP, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, diktat mata kuliah Hadis dan Ulum Hadis STAIN Purwokerto, 2006), h. 90. Dijelaskan pula dalam buku ini bahwa hadits tersebut dapat dilihat pada Al-Bukhary, *al-'ilmu bab man su'ila 'ilman wa huwa musytaghilun fi haditsihi fa 'amma al-haditsa tsumma ajaba al-sa'ila...* hadis no. 59 dan 6496; terdapat juga pada Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz II*, h. 361; dan tertuang dalam Al-Baghawiy, *al-Fitan bab asyathu al-sa'ah*, hadits No. 4127.

- empat, yaitu: (1) Kemanusiaan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Persatuan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Kerakyatan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian ini tersurat dalam simbol (gambar) yang ada di dada Garuda sebagai lambang Pancasila. Bintang atau simbol keimanan mengambil daerah empat sila lainnya. Hal ini menandung makna bahwa inti Pancasila adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sasaran utama pendidikan agama sekaligus menjadi inti atau *core* kurikulum di sekolah.
- b. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama... dan seterusnya.
 - c. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Guru dan Dosen Pasal 6). Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia...dan seterusnya (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7). Bahkan sistem pendidikan nasional saat ini telah mengembangkan *arkan at-ta'allum wa at-ta'lim* atau yang biasa disebut dengan pilar-pilar belajar dan pembelajaran, yang salah satunya adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk: (1) menumbuhkembangkan akidah

melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; (2) mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.⁶²

3. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memaparkan bahwa:

- a. Pendidikan nasional berfungsi untuk membangun kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
- b. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan bangsa.

Jika merujuk pada pengertian pendidikan Islam, maka akan terlihat jelas bahwa sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan yakni kepribadian seseorang yang

⁶² Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 135-136.

membuatnya menjadi insan kamil dengan pola ketaqwaan menjadikan manusia itu utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwaanya kepada Allah SWT.⁶³

Demikianpun beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai tujuan dari pendidikan Islam, diantaranya:⁶⁴

- a. Naquib al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup (*philosophy of life*). Jika pandangan hidup itu Islam maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna (*insan kamil*) menurut Islam.

Pemikiran ini tentu masih bersifat global dan belum operasional. Definisi tersebut mengandaikan bahwa semua proses pendidikan harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. *Insan kamil* atau manusia sempurna yang diharapkan tersebut hendaknya diberikan indikator-indikator yang dibuat secara lengkap dan diperjenjang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat operasional dan mudah diukur.

- b. Abd. ar-Rahman Saleh Abdullah mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah, dan tujuan mental. Saleh Abdullah telah mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tiga bidang, yaitu: fisik-materiil, ruhani-spirituil, dan mental-emosional. Ketiga-tiganya harus diarahkan menuju kepada

⁶³ Daradjat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 29.

⁶⁴ Roqib, *Ilmu Pendidikan...*, h. 27-30.

kesempurnaan. Ketiga tujuan ini tentu saja harus tetap dalam satu kesatuan (integratif) yang tidak terpisahkan.

- c. Muhammad Athiyah al-Abrasyi merumuskan tujuan pendidikan Islam secara lebih rinci. Dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi kehidupan dunia-akhirat, persiapan untuk mencari rizki, menumbuhkan semangat ilmiah, dan menyiapkan profesionalisme subjek didik. Dari lima tujuan tersebut semuanya harus menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu indikatornya adalah adanya nilai tambah secara kuantitatif dan kualitatif.
- d. Ahmad Fuad al-Ahwani menyatakan bahwa pendidikan adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmaniah. Disini yang menjadi bidikan dan fokus dari pendidikan Islam adalah soal keterpaduan. Hal tersebut bisa dimengerti karena keterbelahan atau disintegrasi tidak menjadi watak dari Islam.
- e. Abd. ar-Rahman an-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Definisi tujuan pendidikan ini lebih menekankan pada

kepasrahan kepada Tuhan yang menyatu dalam diri secara individu maupun sosial.

- f. Abdul Fatah Jalal menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang mampu beribadah kepada Allah SWT, baik dengan pikiran, amal, maupun perasaan.
- g. Umar Muhammad at-Taumi asy-Syaibani mengemukakan bahwa tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dimana guna beribadah kepada Allah SWT, bukan manusia yang siap pakai dalam arti siap dipakai oleh lembaga, pabrik, atau yang lainnya. Jika yang terakhir ini dijadikan tujuan dan orientasi pendidikan maka pendidikan hanya ditujukan sebagai alat produksi tenaga kerja dan memperlakukan manusia bagaikan mesin dan robot. Pendidikan seperti ini tidak akan mampu mencetak manusia terampil dan kreatif yang memiliki kebebasan dan kehormatan.
- h. Ali Khalil Abu al-‘ainaini mengemukakan bahwa hakekat pendidikan Islam adalah perpaduan antara pendidikan jasmani, akal, akidah, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Adanya nilai keindahan atau seni yang dimasukkan dalam tujuan pendidikan berbeda dengan definisi yang dikemukakan para ahli lainnya. Keindahan dan seni memang harus dieksplisitkan karena kesempurnaan secara riil pada akhirnya ada pada nilai seni. Jika sesuatu tersebut telah menyentuh wilayah seni maka kesempurnaan

dan keindahan dari sesuatu tersebut sudah riil dan menjadi bagian darinya.

Lebih luas Darajat menuraikan bahwa, tujuan pendidikan Islam meliputi:⁶⁵

- a. Tujuan umum; yakni tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang terdiri atas sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi dengan kerangka yang sama. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal (sekolah/ madrasah) dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional.
- b. Tujuan akhir; pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir. Tujuan umum berbentuk *insan kamil* tentu mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang bagi setiap perjalanan seseorang.

⁶⁵ Darajat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 30-33.

Perasaan, lingkungan dan pengalaman juga dapat mempengaruhinya. Karena itu, pendidikan Islam berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Hal ini juga diperjelas dalam Q.S. Ali Imran ayat 102, Allah SWT berfirman:⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.*

- c. Tujuan sementara; ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan khusus (TIU dan TIK) dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan Islam harus dapat merumuskan tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tingkatan jenis pendidikannya (bobot dan muatannya saja yang berbeda).
- d. Tujuan operasioan; ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan tertentu. Satu jenis kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu. Jika pada sekolah/ madrasah, tujuan operasional ini disebut juga tujuan instruksional yang selanjutnya

⁶⁶ Hatta, *Tafsir Qur'an...*, h. 63.

dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus (TIU dan TIK). Tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Misalnya; anak harus sudah terampil melakukan ibadah (sekurang-kurangnya ibadah wajib) meskipun ia belum memahami dan menghayati ibadah tersebut.

Memandang uraian tersebut, jika kekuatan jasmani, akal, dan rohani saling bertalian antara yang satu dengan yang lainnya, niscaya akan memperoleh hasil yang disebut “manusia yang baik” yang menampilkan keterpaduan itu secara nyata dan jelas dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Sehingga tujuan pendidikan secara praktis dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sebuah lembaga yang mampu mengintegrasikan, menyeimbangkan, dan mengembangkan kesemuanya dalam sebuah institusi pendidikan.⁶⁸

4. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum merupakan penjabaran dari tujuan. Dan dalam konteks ini, kurikulum merupakan ruang lingkup yang menjadi materi pelajaran. Oleh karenanya, objek kajian dalam kurikulum tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang dilandasi prinsip dasar dan filsafat yang dipilih, kualifikasi pendidik, kondisi subjek didik, materi yang akan diajarkan, buku teks,

⁶⁷ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam* (terj. Salman Harun), (Bandung: PT. AL Ma'arif, 1993), h. 38.

⁶⁸ Roqib, *Ilmu Pendidikan...*, h. 30.

organisasi kurikulum, penjenjangan, metode, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, prasarana, biaya, lingkungan, evaluasi, pengembangan, dan tindak lanjut.⁶⁹ Maka kurikulum menjadi sangat penting untuk direncanakan dan disusun menuju arah tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi perlu adanya tiga prinsip dalam merancang kurikulum, yaitu: *pertama*, pengembangan pendekatan religius kepada dan melalui semua cabang ilmu pengetahuan; *kedua*, isi pelajaran yang bersifat religius seharusnya bebas dari ide dan materi yang jumud dan tak bermakna; *ketiga*, perencanaan dan pembuatan kurikulum harus memperhitungkan setiap komponen sebagai prinsip (kontinuitas/ kesinambungan, sekuensi, dan integrasi).⁷⁰

Memang dalam pengelompokan mata pelajaran sejak tahun 1952 hingga kurikulum KTSP yang saat ini dipergunakan, maka posisi muatannya mengalami perubahan. Meski demikian, secara tegas dan gamblang dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bab X pasal 36-37 mewajibkan setiap jenjang pendidikan memuat pendidikan agama;⁷¹ tentunya dalam hal ini juga berguna bagi pelajar atau peserta didik yang beragama Islam.

Maka secara khusus bagi pendidikan formal, pokok-pokok materi kurikulum pendidikan Islam meliputi: (a) hubungan manusia dengan Allah

⁶⁹ *Ibid*, h. 77.

⁷⁰ *Ibid*, h. 77-78.

⁷¹ Aulia, *Himpunan Perundang:..*, h. 14-15.

SWT; (b) hubungan manusia dengan manusia; (c) hubungan manusia dengan alam.⁷²

Demikian halnya diuraikan oleh Ramayulis, bahwa ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT; hubungan manusia dengan sesama manusia; hubungan manusia dengan dirinya sendiri; hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.⁷³

Yang kemudian secara rinci, muatan bahan pelajaran pendidikan Islam itu sendiri adalah: keimanan; ibadah; al-Qur'an; akhlak; muamalah; syariah; dan tarikh.⁷⁴

Tidak jauh berbeda dengan penjabaran Munzier Suparta dan Hery Noer Aly, bahwa isi *pertama* pendidikan Islam berkaitan dengan sebuah tujuan besar yaitu beriman kepada Allah SWT serta menjalin hubungan individu, masyarakat, dan umat manusia dengan *al-Khaliq* sehingga kehidupan bertujuan dan memiliki orientasi yang jelas di jalan yang benar menuju ridho Allah SWT. Isi *kedua* ialah amal saleh, saling mengingatkan agar menaati kebenaran (isi ini sejalan dengan ilmu yang bertujuan menyingkap hakikat dan mencari kebenaran), dan saling mengingatkan agar menetapi kesabaran (isi ini melambangkan pendidikan akhlak, karena kesabaran merupakan inti akhlak yang disebut di dalam al-Qur'an lebih dari seratus kali). Isi pendidikan Islam yang *ketiga* ialah pendidikan sosial,

⁷² Daradjat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 134-137.

⁷³ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 104.

⁷⁴ *Ibid*, h. 105. Untuk memperoleh pengetahuan yang luas, maka lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dibaca pada Majid dan Andayani, *Pendidikan Agama...*, h. 239-283.

mencakup kerja sama dalam menumbuhkan keimanan dan amal saleh serta saling mengingatkan agar menaati kebenaran dan menetapi kesabaran.⁷⁵

Perlu diingat pula bahwa dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan diantaranya menyebutkan:

- a. Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Pendidikan Nasional.
- b. Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- c. Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.⁷⁶

Dengan begitu menjadi jelas, bahwa dalam kurikulum pendidikan Islam, baik secara tata pemerintahan maupun manajemen tingkat lembaga pendidikan telah ditentukan sesuai dengan pandangan umum mengenai kebutuhan peserta didik maupun lingkungan masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 bahwa satuan pendidikan diperbolehkan menambahkan muatan kurikulum atau bahan pelajaran pendidikan agama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁷⁷

Dan dalam rangka menyelaraskan terlaksananya pendidikan Islam yang baik juga berdasar pada hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan

⁷⁵ Munzier Suparta dan Hery Noer Aly, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Amisco, 2002), h. 102.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, bab 2 pasal 5 ayat (1)-(4).

⁷⁷ Lihat *Ibid.*, bab 2 pasal 5 ayat (8).

Republik Indonesia, ditetapkanlah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; disana menegaskan bahwa lingkup standar nasional pendidikan meliputi:

- a. Standar isi,
- b. Standar proses,
- c. Standar kompetensi lulusan,
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- e. Standar sarana dan prasarana,
- f. Standar manajemen,
- g. Standar pembiayaan, dan
- h. Standar penilaian pendidikan.⁷⁸

Kesemuannya itu tentu untuk mencapai pelaksanaan pendidikan yang tertib dan sesuai ketetapan tujuan. Demikian halnya bagi pendidikan Islam, maka dalam kurikulumnya diperlukan keselarasan dan keterkaitan antar standar tersebut; dengan harapan tujuan dari pendidikan Islam sendiri dapat tercapai.

Agar menjadikan tujuan pendidikan Islam tercapai, maka ruang lingkungannya pun perlu untuk direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Proses inilah yang akan terus-menerus dilakukan agar tujuan pendidikan Islam benar-benar dapat tercapai.

5. Tahap/ Jenjang Pendidikan Islam

Dalam beberapa dekade ini (khususnya di Indonesia), tahapan atau adapula yang menyebut jenjang pendidikan Islam memang telah mengalami beberapa kali perubahan. Tahap/ jenjang pendidikan disini

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, bab 2 pasal 2 ayat (1).

didasarkan dan disandarkan pada usia peserta didiknya. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pengelola untuk menentukan operasionalisasi atas tujuan pendidikan Islam pada setiap tingkatannya.

Merujuk pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1), bahwa:

- a. Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B, SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat.
- d. Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.⁷⁹

Maka secara khusus, penjenjangan pendidikan Islam yang kemudian diistilahkan dengan madrasah terbagi kedalam:

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan lama pendidikan 6 (enam) tahun.
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan lama pendidikan 3 (tiga) tahun.
- c. Madrasah Aliyah (MA) dengan lama pendidikan 3 (tiga) tahun.

Adapun jenjang perguruan tinggi diklasifikasikan menjadi:

- a. Diploma 2 (D2) dengan lama pendidikan
- b. Diploma 3 (D3) dengan lama pendidikan
- c. Strata 1 (S1) dengan lama pendidikan
- d. Strata 2 (S2) dengan lama pendidikan
- e. Strata 3 (S3) dengan lama pendidikan
- f. Dan jenjang tertinggi adalah profesor.

⁷⁹ Lihat *Ibid.*, pasal 6 ayat (1).

6. Metode Pembelajaran Pendidikan Islam

Berbincang metode pembelajaran, nampaknya akan sangat menarik. Tentunya karena dalam proses pembelajaran akan memerlukan kecerdasan dan keterampilan seorang pendidik. Demikian halnya dalam pembelajaran pendidikan Islam, maka menjadi perlu agar seorang pendidik atau pengajar menguasai metode pembelajarannya.

Secara klasik memang nampak mudah saja mengajarkan; karena umumnya dalam pembelajaran klasik tidak menuntut pendidik dan peserta didik menguasai tiga komponen utama, yaitu penguasaan kemampuan afektif, kognitif dan psikomotorik.

Menjadi berbeda dalam pembelajaran dewasa ini, dimana pada setiap jenjangnya dituntut penguasaan terhadap ketiga kemampuan tersebut di atas. Hal ini dengan harapan agar setiap lulusan mampu menguasai dan sekaligus mengamalkan keilmuan yang telah diperolehnya selama belajar mengajar sesuai jenjangnya.

Dengan pergerakan dan perubahan ini, mengenai metode pembelajaran tentu semakin banyak dan inovatif para ahli merancang metode yang lebih tepat namun tetap atas norma dan aturan pendidikan. Meski demikian, penulis beranggapan bahwa pendapat Munzier Suparta dan Hery Noer Aly yang juga mengemukakan beberapa metode pembelajaran, seperti: ceramah, tanya jawab, diskusi (diskusi kelompok), demonstrasi, tugas belajar dan resitasi, kerja kelompok, sosiodrama (*role playing*), pemecahan masalah (*problem solving*), sistem regu (*team*

teaching), karyawisata (*field-trip*), manusia sumber (*resource person*), simulasi, tutorial, studi kasus, curah gagasan (*brain storming*), studi bebas, kelompok tanpa pemimpin, dan latihan (*drill*), dan latihan kepekaan (dinamika kelompok)⁸⁰ masih relevan dipergunakan sebagai salah satu pilihan metode pengajaran sekarang ini. Tentunya, tinggal membenahi pada tiap-tiap pelaksanaan metode yang dipilihnya.

C. Manajemen Pendidikan Islam

1. Pengertian Manajemen Pendidikan Islam

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, penggunaan sumber daya organisasi yang kesemuanya berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan (yang mencerdaskan pengetahuan dan perilaku manusia); dan juga disandarkan pada pengertian pendidikan Islam yang penulis definisikan dengan segala cakupan pendidikan dan pengajaran pendidikan Islam, baik meliputi kurikulum, sumber daya, juga peserta didik sebagai sasaran utama bagi tujuan pendidikan Islam.

Maka dengan demikian, penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam dalam konteks ini merupakan segala manajemen administrasi dan operasional dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen administrasi sendiri mencakup segala kebutuhan administrasi

⁸⁰ Suparta dan Aly, *Metodologi Pengajaran...*, h. 170.

dari cakupan dalam lingkup lembaga pendidikan Islam (dari kebutuhan administrasi perencanaan sampai evaluasi atau penilaian pendidikan Islam). Sedang manajemen operasional merupakan lingkup yang didalamnya menerapkan bagian-bagian dari segala cakupan lembaga pendidikan Islam itu sendiri (seperti operasionalisasi kurikulum, sumber daya, juga peserta didik).

Baik manajemen administrasi maupun operasional pendidikan Islam tersebut, dalam pandangan penulis akan lebih dominan pada manajemen ke-Islaman; yakni lebih khusus bagi operasionalisasinya. Sebagai contoh dalam operasionalisasi kurikulum; dimana bagi pendidikan Islam mendasarkan muatan atau ruang lingkungannya pada asas ke-Islaman (baik teoritis maupun implikasinya).

Meski demikian, bukan berarti pendidikan Islam disaat sekarang ini tidak penting dan atau mementingkan pergeseran dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengglobal (sebagaimana makin maraknya teknologi, informasi, dan komunikasi). Akan tetapi, bagi pendidikan Islam dalam hal ini diharapkan akan lebih pandai memanfaatkan segala produk ilmu pengetahuan tersebut; bukan malah termanfaatkan.

Disadari atau tidak, bagi banyak pandangan menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam memang menjadi momok terdepan bagi keberhasilan peserta didik. Perlu diingat, sebenarnya selain tanggung jawab tersebut terletak pada lembaga pendidikan namun pada orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama-sama diberikan

amanah. Sebagaimana Daradjat menjelaskan bahwa pemberian bimbingan dilakukan oleh orang tua di dalam lingkungan rumah tangga, para guru di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.⁸¹

2. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam

Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang hendak dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap negara mempunyai dasar pendidikan sendiri. Ia merupakan pencerminan falsafah hidup suatu bangsa. Berdasar kepada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun. Dan oleh karena itu maka sistem pendidikan setiap bangsa itu berbeda karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda.⁸²

Pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan (dasar) kemana semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Maka landasan yang tepat adalah al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW yang dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah al-mursalah, istihsan, qiyas dan sebagainya.⁸³

Agar lebih mengena terhadap dasar manajemen pendidikan Islam, berikut penulis uraikan beberapa dasar-dasar yang bisa dijadikan sumber rujukan bagi manajemen pendidikan Islam. Diantaranya:

⁸¹ Lihat penjelasan dalam Daradjat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 34-47.

⁸² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 121; sebagaimana dikutip oleh Ahmad Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan: Studi Ayat-Ayat Berdimensi Pendidikan* (Banten: Pustaka AuFa Media, 2012), h. 13.

⁸³ Daradjat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 19.

a. Al-Qur'an

Ditinjau dari asal katanya Al-Qur'an berasal dari yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun secara terminologi Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada manusia secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas.⁸⁴

Secara historis, Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama, pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam disamping sunnah beliau sendiri.⁸⁵ Perihal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 64, Allah SWT berfirman:⁸⁶

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : *Dan Kami tidak menurunkan Kitab (al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

Mengutip pendapat Fadhil Al-Jamali, Ramayulis mencatatkan bahwa: “pada hakikatnya Al-Qur'an itu merupakan perbendaharaan

⁸⁴ Toto Suryana et.al, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Tiga Mutiara, 1996), h. 19; sebagaimana dikutip oleh Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan...*, h. 13.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 14.

⁸⁶ Hatta, *Tafsir Qur'an...*, h. 273.

yang besar untuk kebudayaan umat manusia, terutama bidang kerohanian. Ia pada umumnya merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan, moral (akhlak) dan spiritual”.⁸⁷ Maka penulis beranggapan bahwa Al-Qur’an merupakan pondasi dasar yang sangat berdaya guna bagi pendidikan; dimana didalamnya mencakup sangat luas akan *tarbiyah*. Demikian halnya bagi manajemen pendidikan Islam, sudah barang tentu penting menjadi dasarnya.

b. Sunnah

Mengenai hal ini Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21, berfirman:⁸⁸

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : *Sungguh, telah ada suri teladan yang baik pada (diri) Rasulullah bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*

Selain dasar yang tertuang dalam al-Qur’an, perihal ini juga diperjelas melalui hadits yang bersumber dari Abu Hurairah, yang artinya :

dari Abu Hurairah dia berkata ketika Nabi SAW sedang duduk dalam sebuah majlis tengah membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki Badui lalu bertanya, “Kapan datang kehancuran (kiamat)?” Rasulpun terus saja berbicara;

⁸⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, h. 123; sebagaimana dikutip oleh Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan...*, h. 14.

⁸⁸ Hatta, *Tafsir Qur’an...*, h. 420.

maka berkata sebagian kaum, beliau mendengar apa yang dia katakan, tetapi beliau tidak menyenangkannya. Sebagian lainnya berkata, beliau tidak mendengar (pertanyaan itu) sampai beliau rampung bicaranya. Beliau bersabda, “Dimana-tunjukkan kepada saya siapa yang bertanya kapan datangnya kebinasaan (kiamat)!”. Dia berkata, “Saya wahai Rasulullah!”. Rasulpun bersabda, “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kebinasaan) kiamat!”. Orang itupun bertanya, “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasul menjawab, “Jika suatu urusan dipercayakan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kebinasaan”.⁸⁹

Jelaslah disini bahwa, untuk menjadikan pendidikan terarah dan terukur semestinya mencontoh dan menempatkan pada bidangnya (ahlinya). Sehingga pendidikan Islam saat inipun perlu berpegang kepada contoh-contoh dan para spesialis pendidikan. Artinya, meski segala penjurur arah melalui ilpeng dan iptek yang mudah diperoleh, namun menjadi keniscayaan agar pendidikan Islam tetap *cekel waton* (berpegang kepada ahlinya dalam pendidikan Islam). Tidak mudah terpengaruh dan beralih hanya sekedar mengikut-ikut hal yang belum jelas keabsahannya.

c. Ijtihad

Perlu diketahui bahwa ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan dan kemampuan untuk menetapkan hukum *syara'* dengan jalan mengeluarkan dari al-Qur'an dan Sunnah. Adapun orang yang

⁸⁹ Muhammad Dailamy SP, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, diktat mata kuliah Hadis dan Ulum Hadis STAIN Purwokerto, 2006), h. 90. Dijelaskan pula dalam buku ini bahwa hadits tersebut dapat dilihat pada Al-Bukhary, *al-'ilmu* bab *man su'ila 'ilman wa huwa musytaghilun fi haditsihi fa 'amma al-haditsa tsumma ajaba al-sa'ila...* hadis no. 59 dan 6496; terdapat juga pada Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz II*, h. 361; dan tertuang dalam Al-Baghawiy, *al-Fitan* bab *asyathu al-sa'ah*, hadits No. 4127.

melakukan ijtihad dikenal sebagai mujtahid, yakni ahli fikih yang menghabiskan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat (*zhan*) terhadap suatu hukum agama dengan jalan *istibath* dari al-Qur'an dan Sunnah. Dan penggunaan ijtihad dapat dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan dan ajaran Islam, termasuk juga aspek pendidikan.⁹⁰

Maka, ijtihad di bidang pendidikan semakin diperlukan, sebab ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah sifat pokok-pokok dan prinsip-prinsipnya saja. Ditengok dari sejarah, sejak diturunkan sampai Nabi Muhammad SAW wafat, ajaran Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula. Dan tentunya sebaliknya, ajaran Islam sendiri telah berperan mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan muslim.⁹¹

Demikian halnya, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam diperlukanlah ijtihad sebagai bagian mempertahankan penyebaran ajaran-ajaran dan lembaga-lembaga Islam. Selain itu, pentingnya ijtihad bagi pendidikan nasional di bangsa kesatuan Indonesia adalah upaya mempererat persaudaraan antar pulau, suku dan ras juga adat-istiadat. Yang kesemuanya itu demi pengembangan dan peningkatan umat manusia bangsa Indonesia dengan munculnya teknologi dan komunikasi yang begitu deras dan pesat.

⁹⁰ Suryana et.al, *Pendidikan Agama...*, h. 62; sebagaimana dikutip oleh Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan...*, h. 18.

⁹¹ Daradjat, *Ilmu Pendidikan...*, h. 22.

Perihal ini sesuai dengan ijihad yang ditilik dari segi materinya, yakni memuat *qiyas* (perbandingan), *ijma'* (kesepakatan), *istihsan* (kebaikan), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umat), dan *'urf* (nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat).⁹²

3. Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Memperbincangkan kurikulum memang sesuatu yang tiada habis-habinya, terlebih lagi kurikulum yang berorientasi bagi kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana dalam konteks ke-Indonesia-an, tujuan dari pada pendidikan sangat jelas tertuang didalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (bab II, pasal 3) yang mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁹³

Memang, menjadi sebuah mimpi besar yang sangat baik dari tujuan tersebut di atas. Namun untuk mencapai tujuan itu, kiranya diperlukan pelbagai perangkat dalam pendidikan. Yang salah satunya adalah

⁹² Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan...*, h. 19-20. Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai ijihad ditinjau dari segi materinya sebagaimana pada Suryana et.al, *Pendidikan Agama...*, h. 63, terdapat pula penjelasan pada Mustafa Zaid, *Al-Mashlahah fi Al-Islami wa Najmudin al-Thufi*, cet. Ke 2 (Mesir: Dar Al-Fikr, 1964), h. 149, terdapat pula penjelasan Ramayulis, *Ilmu...* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 129--disini dipertegas bahwa untuk lebih jelas lihat Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Al-Qabah al-Thaba'ah wa an-Naisyar, 1978), h. 91.

⁹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI tentang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h. 4.

kurikulum; yaitu sebuah rancang bangun sistemis yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia.

Jika kita tinjau dari perjalanan sejarahnya, kurikulum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang senantiasa mengarah pada peningkatan kualitas hasil dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Perkembangan kurikulum di barat dimulai oleh Chasles dan McMurry (1890), yang kemudian dilanjutkan oleh Franklin Babbit (1918), kemudian oleh Werrett W. Charlter (1923), kemudian oleh Hollis Caswell (1920-an), Hasil Diskusi Besar di Universitas Chicago (1947), Ralph W. Tyler (1949), Hilda Taba (1962), George A. Beauchamp and Othanel Smith (1963), James B. MacDonald (1964), Broudy, Smith, and Burnett (1964), Rangkuman Beauchamp (1960-1965), Alizabeth S. Maccia (1965), Thomas L Faix (1966), Mauritz Johnson (1967), dan Jack R. Frymier (1967).⁹⁴ Beberapa tokoh tersebut telah memberikan ide tentang kurikulum; baik bagi kancah pendidikan maupun lembaga lainnya. Dan tentunya sangat bervariasi pendapat mereka tentang kurikulum. Namun demikian, pada pokoknya mereka telah memberikan warna baru bagi lembaga pendidikan terutama tentang pemikiran kurikulumnya.

Bagaimana dengan pengembangan kurikulum di Indonesia?

Pertanyaan mendasar inilah yang perlu digali dan dikaji jawabannya.

⁹⁴ Lihat Peter F. Olivia, *Curriculum Development*, Canada, 1982. Robert S. Zais, *Curriculum Principles and Foundations*, London, 1976. John P. Miller, *Curriculum Perspectives and Practice*, London, 1985. Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung, 2005. Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung, 2009. Muhammad Rohman - Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan: Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran Yang Efektif*, Jakarta, 2012.

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia sejauh ini juga telah mengalami perkembangan kurikulum. Tentunya diawali dengan pondasi UU Dasar 1945, kurikulum mulai dirancang meski belum terbentuk secara yuridis-formal (1945-1950). Kemudian dikembangkan menjadi Rencana Pelajaran (1947), Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana (1961) dimasa Jepang, Rencana Pendidikan (1964), Penyempurnaan Pancawardhana (1965) dimasa Jepang, Kurikulum (1968), Kurikulum (1975), Kurikulum (1984), Kurikulum (1994), Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004).⁹⁵ Dan berikutnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006).⁹⁶ Adapun kurikulum yang sedang kita nantikan adalah Kurikulum 13 (2013).⁹⁷ Dari keseluruhan perkembangan kurikulum tersebut nampaknya dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengembangan dan penyesuaian dari kebutuhan masyarakat kebanyakan.

Sebelum penulis simpulkan mengenai kurikulum pendidikan Islam, ada baiknya jika disini diuraikan mengenai kurikulum. Sebagaimana banyak diketahui, bahwa secara *etimologi*, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* (yang artinya berlari) dan *curere* (yang artinya tempat berpacu).⁹⁸ Dalam bahasa Latin, kurikulum berasal dari kata *curriculum* yang berarti *a running course, or race course, especially a chariot race*

⁹⁵ Lihat bukunya Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta, 2005. Lebih detail tentang KBK dapat dilihat pada bukunya Hari Suderajat, *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung, 2004. Dan E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung, 2003.

⁹⁶ Dapat dilihat pada bukunya Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung, 2012.

⁹⁷ Lihat Loeloe Endah Poerwati dan Sofan Amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013*, Jakarta, 2013.

⁹⁸ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 183 sebagaimana dikutip oleh Arifin, *Pengembangan Manajemen...*, h. 35.

course. Sedang dalam bahasa Prancis, kurikulum dikaitkan dengan kata *couriercourie* yang artinya *to run* (berlari). Kemudian, istilah ini digunakan untuk sejumlah *courses* atau mata pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai suatu gelar atau ijazah.⁹⁹

Dalam pandangan khusus, John P. Miller dan Wayne Seller menyatakan bahwa: *in the middle of the spectrum, curriculum is viewed as an interaction between students and teachers that is designed to achieve specific educational goals*.¹⁰⁰

Lebih tegas Hollis L. Caswell dan Doak S. Campbell memandang bahwa: *curriculum not as a group of courses but as "all the experiences children have under the guidance of teachers"*.¹⁰¹

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (bab I, pasal 1, ayat 19) menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁰²

Menurut Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, memberikan penjelasan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan mengenai jenis, ruang lingkup, urutan

⁹⁹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 9 sebagaimana dikutip oleh Arifin, *Pengembangan Manajemen...*, h. 35.

¹⁰⁰ John P. Miller and Wayne Seller, *Curriculum Perspectives and Practice* (New York & London: Longman, 1985), h. 3.

¹⁰¹ Peter F. Olivia, *Curriculum Development* (Canada: Little, Brown & Company, 1982), h. 6.

¹⁰² Aulia, *Sisdiknas: UU...*, h. 3.

isi, serta proses pendidikan.¹⁰³ Maka kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan yang memuat tujuan, isi, bahan serta cara dalam proses pendidikan di sekolah.

Hal ini dijelaskan Abd. Rachman Assegaf bahwa kurikulum dipahami tidak sekedar sebagai materi (*conten*) yang harus dipelajari saja, melainkan juga menyangkut tujuan (*puposes*), metode (*methods*), dan penilaian (*evaluation*). Lalu, kurikulum dipahami sebagai segala kegiatan dan pengalaman belajar yang diprogram oleh lembaga pendidikan bagi peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan. Termasuk dalam pengertian ini adalah proram kegiatan diluar sekolah dalam bentuk *ekstrakurikuler*. Mengingat semakin luasnya makna kurikulum, maka menjadi penting untuk disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar peserta didik (*psychological foundation*), kebutuhan masyarakat (*social foundation*), dan perkembangan ilmu atau akademik itu sendiri (*philosophical foundation*).¹⁰⁴

Berbicara kurikulum, tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan. Maka dalam menentukan dan merumuskan tujuan kurikulum ada sejumlah sumber yang dapat digunakan, yakni falsafah bangsa strategi

¹⁰³ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 190.

¹⁰⁴ Assegaf, *Politik Pendidikan...*, h. 125-126. Lihat pula penjelas tersebut dalam Keith Thomson & John White, *Curriculum Development* (Canada: The Copp Clark Publishing Company, 1975), h. 2; David Pratt, *Curriculum: Design and Development* (USA: Harcourt, 1980), h. 4; Peter J. Hills, *A Dictionary of Education* (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), h. 119; Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (New York: Harcourt, Brace and World, 1962), h. 4; dan Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 102.

pembangunan nasional, hakikat anak didik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰⁵

Perlu diketahui pula bahwa muatan kurikulum pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk penulis bahas pada kesempatan ini. Dimana diingatkan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (bab X pasal 36 ayat 3):¹⁰⁶

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Maka turunan dari kurikulum pendidikan Islam, memuat:¹⁰⁷

a. pengetahuan *perennial* (ilmu-ilmu abadi), meliputi:

1) Al-Qur'an; yakni:

a) Membaca (*qira'ah*), menghafal (*hifz*), interpretasi *tafsir*)

b) Sunnah

c) Sirah Nabi Muhammad SAW., para sahabat nabi dan umat Islam perode awal

d) Tawhid

¹⁰⁵ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 22.

¹⁰⁶ Aulia, *Sisdiknas: UU...*, h. 14.

¹⁰⁷ Roqib, *Ilmu Pendidikan...*, h. 81-82.

- e) Ushul Fiqh dan Fiqh
 - f) Bahasa Arab Al-Qur'an (fonologi, sintaksis, dan semantik)
- 2) Materi tambahan: filsafat Islam, perbandingan agama, dan kebudayaan Islam.
- b. pengetahuan *acquierd-muktasabat* (ilmu-ilmu hasil pencarian dan pemikiran manusia), meliputi:
- 1) imaginatif-Seni: seni Islam dan arsitektur, bahasa dan sastra
 - 2) ilmu-ilmu intelektual: studi sosial (teoretik), filsafat, pendidikan, ekonomi, ilmu-ilmu politik, sejarah, peradaban Islam, geografi, sosiologi, ilmu bahasa, psikologi, dan antropologi
 - 3) ilmu-ilmu pengetahuan alam (teoretik): filsafat ilmu, matematik, statistik, fisika, ilmu kimia, dan lain-lain
 - 4) ilmu-ilmu terapan: rekayasa dan teknologi, kedokteran, pertanian, dan kehutanan
 - 5) praktik: perdagangan, ilmu-ilmu administrasi, ilmu-ilmu perpustakaan, ilmu-ilmu rumah tangga, dan ilmu-ilmu komunikasi.

Untuk menerapkan materi pendidikan Islam dalam lingkaran manajemen mutu, maka perlu menurut penulis memperhatikan prinsip-prinsip kurikulum, yakni: (1) prinsip umum: perlu ditinjau dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas atau kesinambungan, praktis; (2) prinsip khusus: prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi

pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, dan pemilihan kegiatan penilaian.¹⁰⁸

Dan minimbang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Manajemen Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; maka penggunaan jenis kurikulum yang saat ini berlaku adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Beberapa hal yang penulis anggap penting dari KTSP ini adalah:

- a. Sekolah/ madrasah menyusun KTSP
- b. Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya
- c. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/ madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik
- d. Kepala sekolah/ madrasah bertanggung jawab atas tersusunnya KTSP.¹⁰⁹

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan Islam, dari paparan di atas menunjukkan bahwa segala perihal yang mencakup kurikulum perlu untuk dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Sehingga, dalam pergerakan arus globalisasi yang ditandai dengan adanya pasar bebas dan pertumbuhan teknologi bukan menyempitkan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri; melainkan berdampak positif kearah perkembangan dan

¹⁰⁸ Arifin, *Pengembangan Manajemen...*, h. 48-53.

¹⁰⁹ Aulia, *Sisdiknas: UU...*, h. 362.

kemajuan pendidikan Islam yang lebih bermutu. Tentunya, pergeseran peradaban dari pola kurikulum yang diawali dengan pemahaman belajar mengajar--kini beralih menjadi kurikulum pendidikan Islam yang secara terus menerus dapat mengikuti dan diikuti atas perubahan zaman.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Hal ini terlihat dari minat yang semakin meluas di kalangan para ilmuwan tentang manajemen sumber daya manusia berakibat positif dalam mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Semua perkembangan yang terjadi dapat disimpulkan bermuara pada suatu prinsip yang sangat fundamental, yaitu bahwa manusia tidak mungkin diperlakukan sama dengan alat produksi lainnya, melainkan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat.¹¹⁰

Manajemen SDM yang holistik menyangkut bukan saja unsur-unsur internal organisasi, tetapi juga unsur-unsur eksternal. Dan didalamnya perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di alam lingkungan. Terlebih, penganutan nilai-nilai moral absolut merupakan suatu keharusan bukan saja secara normatif sesuai kepercayaan agama masing-masing, tetapi juga merupakan suatu imperatif bagi keberhasilan yang berkelanjutan dalam mewujudkan cita-cita atau visi organisasi. Bahkan, untuk mewujudkan visi organisasi maka dibutuhkan sumber daya

¹¹⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 39.

manusia yang handal. Pembentukan modal manusia membutuhkan investasi yang tepat agar investasi tersebut dapat mewujudkan pengalaman pembentukan modal manusia dan kaitannya dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.¹¹¹

Berbicara sumber daya manusia dalam dunia pendidikan tak bisa dilepaskan dari struktur organisasi lembaga. Artinya, setiap lembaga pendidikan menuntut adanya pimpinan dan bawahan. Hal ini diteaskan bahwa signifikansi kepemimpinan untuk melakukan transformasi TQM tidak boleh diremehkan. Tanpa kepemimpinan, pada semua level institusi, proses peningkatan tidak dapat dilakukan dan diwujudkan.¹¹²

Penekanan pemimpin pendidikan tersumber pada pendorongan dan pemberdayaan tanggungjawab langsung terhadap pengajaran *face-to-face*.

Untuk menjadikan pemimpin pendidikan yang bermutu, perlu:

- a. memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam proses perubahan guna merefleksikan praktek dan mengembangkan pemahaman personal tentang sifat dan implikasi perubahan terhadap diri mereka;
- b. mendorong mereka yang terlibat dalam implementasi perbaikan untuk membentuk kelompok-kelompok sosial dan membangun tradisi saling mendukung selama proses perubahan;
- c. membuka peluang *feedback* positif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan;
- d. harus sensitif terhadap *outcomes* proses pengembangan dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi *feedback* yang dibutuhkan, kemudian menindaklanjutinya dengan melibatkan beberapa pihak dalam mendiskusikan ide-ide dan prakteknya.¹¹³

¹¹¹ Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Non Sekuler* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 38-39.

¹¹² Sallis, *Total Quality...*, Riyadi dan Fahrurroazi (terj.), h. 171.

¹¹³ Bush and Coleman, *Manajemen Mutu...* (terj. Fahrurrozi), h. 80-81.

Dalam rangka menciptakan perubahan dan perkembangan ke arah manajemen yang lebih baik dalam pendidikan, perlu adanya *pertama*, kepemimpinan berbobot: (1) pemimpin perubahan sudah mengikuti kursus yang relevan, (2) pemimpin perubahan mengungkapkan suatu minat pribadi dalam kadar dari perubahan, (3) pemimpin perubahan bicara dengan suatu derajat keahlian dan suatu pemahaman holistik yang menandai tentang bidang bobot. *Kedua*, kepemimpinan proses: (1) pemimpin perubahan menerima pandangan manajerial dari perkembangan, (2) pemimpin perubahan menempatkan perubahan dalam suatu konteks umum untuk perbaikan.¹¹⁴

Memang, manajemen perlu dan harus didukung oleh seorang manajer yang menguasai beberapa keterampilan. Tanpa menguasai keterampilan standar, seorang manajer tidak mampu melakukan perubahan manajemen sesuai dengan ilmu manajemen yang ada untuk mengarahkan lembaga pada tujuannya secara fokus dan konsisten. Diantaranya adalah keterampilan konsep (menentukan strategi, kebijakan, merencanakan sesuatu yang baru, dan memutuskan), keterampilan manusiawi (kemampuan melakukan kontak hubungan kerja sama secara optimal kepada orang-orang yang diajak bekerja dengan memperhatikan kodrat dan harkatnya sebagai manusia), dan keterampilan teknik (yakni

¹¹⁴ John MacBeath and Peter Mortimore, *Improving School Effectiveness: Memperbaiki Efektivitas Sekolah* (terj. Nin Bakdi Soemanto), (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 198-199.

kemampuan membimbing dan mengontrol secara betul; baik berkaitan dengan proses belajar mengajar maupun teknik ketatausahaan).¹¹⁵

Adapun tugas yang harus dikerjakan seorang manajer, diantaranya:¹¹⁶

- a. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain;
- b. Manajer berhubungan agar setiap tugas dilaksanakan dengan berhasil;
- c. Manajer menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas;
- d. Manajer harus menentukan siapa yang akan melaksanakan suatu tugas tertentu dan harus menunjuk tugas tertentu pada bawahan yang tepat;
- e. Manajer harus berfikir secara analitis dan konseptual;
- f. Manajer adalah penengah (mediator);
- g. Manajer adalah politikus;
- h. Manajer adalah diplomat;
- i. Manajer membuat keputusan yang sulit;
- j. Manajer harus mempunyai visi, terutama untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidak pastian.

Dalam konteks peranan manajer dalam lingkup terkecil (sekolah), tentunya diperlukan pembinaan terhadap kurikulum, hal ini dibutuhkan karena kepala sekolah (manajer) sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Dengan kata lain, kepala sekolah harus memimpin semua staf yang ada di sekolah, agar dalam

¹¹⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional* (Jogjakarta: DIVA Press, 2009), h. 84-90.

¹¹⁶Sabardi, *Pengantar Manajemen...*, h. 9-10.

melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada terlaksananya kurikulum.¹¹⁷

Dengan begitu, segala sumber daya manusia yang ada pada organisasi/ lembaga sekolah akan menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

5. Manajemen Sarana Prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah.¹¹⁸

Agar tercipta kondisi sarana dan prasarana yang bermutu, maka dalam lembaga pendidikanpun membutuhkan manajemen yang terpadu. Tentunya meliputi dua hal di atas (yakni bidang sarana, juga bidang prasarana). Sehingga, manajemen dalam hal sarana dan prasarana akan lebih berdaya guna sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Maka, dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Adapun kegiatan manajemen tersebut meliputi perencanaan,

¹¹⁷ Sudjana, *Pembinaan dan...*, h. 22.

¹¹⁸ Rohman dan Amri, *Manajemen Pendidikan...*, h. 267.

pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi dan penghapusan serta penataan.¹¹⁹

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Manajemen Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menjabarkan mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

- a. Sekolah/ madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai manajemen sarana dan prasarana
- b. Program manajemen sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal ini:
 - 1) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;
 - 3) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/ madrasah;
 - 4) Menyusun skala prioritas yang pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat;
 - 5) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.
- c. Seluruh program manajemen sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
- d. Manajemen sarana prasarana sekolah/ madrasah:
 - 1) Rencanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana;
 - 2) Ditungkan dalam rencana pokok (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.
- e. Manajemen perpustakaan sekolah/ madrasah perlu:
 - 1) Menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;
 - 2) Merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik;
 - 3) Membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja;
 - 4) Melengkapi fasilitas peminjaman antarperpustakaan, baik internal maupun eksternal;
 - 5) Menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/ madrasah lain baik negeri maupun swasta.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 267.

- f. Manajemen laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan
- g. Manajemen fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarpras dan Prasarana.¹²⁰

Segala sarana dan prasarana sebagai bentuk upaya maksimalisasi dan peningkatan mutu pendidikan, menjadi penting untuk diadakan. Demikian halnya segala kebutuhan dalam pendidikan Islam yang terpaut didalamnya, maka sarana dan prasarana menjadi bagian penting agar tujuannya tercapai.

6. Manajemen Pembiayaan

Penerapan sistem manajemen pembiayaan dalam dunia pendidikan tidak dapat tersangkalkan lagi. Permasalahan yang sering muncul dari lembaga terkait manajemen pembiayaan adalah sumber dana terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Agar lembaga pendidikan bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik yang merugikan, maka dibutuhkan tata pamong yang baik (*good governance*).¹²¹

Terkait pembiayaan, pemerintah berkewajiban menjamin pendanaan guna terselenggaranya pendidikan. Hal ini tertuang dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (bab IV bagian ke empat pasal 11 ayat

¹²⁰ Aulia, *Sisdiknas: UU...*, h. 367-368.

¹²¹ Jerry H. Makawimbang, *Kepemimpinan Pendidikan Yang Bermutu* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 186.

2): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”¹²²

Ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan yang teramat penting. Maka untuk menjadikan manajemen pembiayaan lebih terkontrol dan tepat sasaran, dijabarkanlah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Manajemen Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai berikut:

- a. Sekolah/ madrasah menyusun pedoman manajemen biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan;
- b. Pedoman manajemen biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah mengatur:
 - 1) Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola;
 - 2) Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional;
 - 3) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah/ madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Pedoman manajemen biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah diputuskan oleh komite sekolah/ madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/ madrasah serta mendapat persetujuan dari institusi di atasnya;
- d. Pedoman manajemen biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/ madrasah untuk menjamin tercapainya manajemen dana secara transparan dan akuntabel.¹²³

Secara administratif, turunan dari pelaksanaan kelengkapan manajemen pembiayaan pendidikan dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Kartu SPP; adalah alat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh peserta didik atas sejumlah biaya yang menjadi kewajibannya. Kartu

¹²² Aulia, *Sisdiknas: UU...*, h. 6.

¹²³ *Ibid*, h. 368-369.

- SPP ini berfungsi juga sebagai sarana monitoring/ pengawasan atas uang yang telah diserahkan kepada anak untuk dibayarkan ke sekolah/ madrasah (terutama SMP/SMA) dimana dia menempuh pendidikan;
- b. Kwitansi pembayaran; berfungsi juga sebagai bukti bahwa siswa/ orang tua siswa telah melakukan pembayaran atas suatu tanggungan tertentu;
 - c. Buku penerimaan; ini mencatat seluruh pemasukan uang dari berbagai sumber yang diterima oleh sekolah, khususnya adalah uang SPP dan uang lain yang telah ditetapkan diluar uang proyek atau pembangunan.
 - d. Buku pengeluaran; uang yang masuk atau diterima oleh pihak sekolah dari berbagai pos pemasukan harus dicatat sedemikian rupa, sehingga akan dapat diketahui seberapa besar dana yang telah didapat oleh sekolah untuk nantinya dialokasikan/ didistribusikan untuk membiayai atau membayar sejumlah keperluan/ program yang telah ditetapkan.¹²⁴

D. Gambaran Pendidikan Islam Masa Kolonial dan Sekarang

1. Kondisi Pendidikan Masa Kolonial Belanda

Sedikit perlu penulis singgung tentang kolonial Belanda; semata-mata hal ini untuk mempertegas siapa kolonial Belanda. Istilah kolonialisme di Indonesia mulai dikenal dengan hadirnya maskapai perdaangan Belanda VOC (*Verrenigde Oost Indische Companie*) pada Maret 1602. Melalui maskapai inilah akumulasi modal untuk kekayaan kerajaan Belanda hingga melahirkan tanam paksa di bumi Nusantara

¹²⁴Muh. Hizbul Muflihin, *Administrasi Pendidikan: Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2013), h. 273-278.

dahulu. Dan dalam perkembangannya, akibat manajemen yang buruk dan banyak di antara pegawainya yang melakukan korupsi, maskapai perdagangan ini bangkrut dan gulung tikar dengan meninggalkan hutang dalam jumlah besar.¹²⁵ Dengan kondisi yang sedemikian, maka pemerintah Belanda mengambil seluruh tanggung jawab VOC dan sejak saat itulah Nusantara resmi dikuasai Kerajaan Belanda. Sayangnya, pemerintah Belanda tetap melanjutkan kebijakan tradisional VOC dengan mengeksploitasi Hindia Belanda bagi kebutuhannya sendiri.¹²⁶

Hal ini sangat jelas dan tegas termuat dalam ikrar (*Korte Verklaring*); yang isinya bahwa:¹²⁷

- a. Suatu daerah menjadi bagian-mutlak dari Kerajaan Hindia-Belanda;
- b. Hubungan politik dengan luar negeri tidak mungkin lagi kecuali hubungan dengan Hindia-Belanda saja;
- c. Urusan dalam negeri dikuasai oleh Pemerintah Hindia-Belanda.

Dengan demikian, ekspansi lanjutan kolonial Belanda tidak hanya pada niaga seperti awal masuknya; melainkan sudah berkembang pada penguasaan (penjajahan). Termasuk juga tentunya mengenai pendidikan.

Oleh karena urusan pendidikan masuk pada urusan dalam negeri yang segalanya dikuasai oleh Belanda, sehingga pendidikan yang ada pun diawasinya secara ketat. Hal tersebut dikarenakan Belanda tahu bahwa

¹²⁵ Parakitri Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995), h. 72. Namun untuk sejarah VOC lengkapnya lihat C.R. Boxer, *Jan Kamperi: Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799*, terj. Bakri Siregar (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 107-154 sebagaimana dikutip Safrizal Rambe, *Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942* (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008), h. 18.

¹²⁶ Rambe, *Sarekat Islam...*, h. 18.

¹²⁷ Lihat R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 320.

melalui pendidikan gerakan-gerakan perlawanan halus terhadap keberadaan Belanda di Indonesia pada saat itu dapat muncul dan menyulitkan Belanda saat itu. Usaha Belanda untuk membatasi pendidikan terhadap kalangan pribumi terus berlanjut, hingga saat muncul kritik dari para kaum humanis Belanda. Sindiran dan kritik para kaum humanis yang dituangkan dalam tulisan seperti Max Havelaar (*Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company, Multatuli, 1860*) sedikit banyak telah memaksa Belanda untuk memberlakukan politik etis (Ethical Policy- '*Ethische Politiek*'), atau juga dikenal sebagai politik balas budi, pada sekitar tahun 1901.¹²⁸

Dalam catatan sejarah lain disebutkan bahwa, pada tahun 1899 terbit tulisan C.T. Van Deventer yang terkenal dengan judul “Hutang Budi”; dimana pokok isinya adalah Belanda telah berhutang budi pada Hindia atas dana yang digunakannya pada perang Diponegoro dan perang kemerdekaan Belgia. Selanjutnya pada tahun 1908, C.T. Van Deventer kembali mengecam pemerintah kolonial yang ditulisnya dalam majalah *De Gids* bahwa ia mengatakan “sampai pada waktu-waktu yang terakhir, hampir tak ada kita memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa Bumiputera...”. demikian menyedihkannya kaum pribumi yang ada dibawah kolonialisme. Mereka hanya menjadi objek eksploitasi, demi peningkatan kesejahteraan kaum kolonial. Maka dari itu, C.T. Van Deventer mengatakan “Hutang Budi” itu

¹²⁸ Pulung Septyoko, “Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda”, makalah <http://pikokola.wordpress.com/files/2008/11/pendidikan-masa-kolonial-dan-sekarang.pdf> (diakses 9 Juli 2015).

harus dibayar dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, melalui tiga sila sebagai semboyannya yaitu: “irigasi, edukasi, dan emigrasi”.¹²⁹

Mengenai pendidikan, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya barat untuk kalangan pribumi. Akan tetapi keberadaan sekolah-sekolah ini ternyata tidak menjadi sebuah sarana pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yang disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca, dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia.

Sedangkan sistem pendidikan masa VOC meliputi: 1). Pendidikan dasar, 2). Sekolah latin, 3). Seminarium theologicum (sekolah seminar), 4). Academie der marine (akademi pelayanan), 5). Sekolah cina, dan 6). Pendidikan Islam.¹³⁰ Yang secara umum klasifikasinya sebagai berikut: 1). Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan; 2). Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan.¹³¹

Melihat kondisi yang demikian menjadikan organisasi masa kalangan pribumi menaruh prihatin yang mendalam. Sehingga pada masa itu pula, pendidikan-pendidikan rakyat turut muncul dan berkembang. Jadi dapat dikatakan pada masa tersebut terdapat tiga tipe jalur pendidikan yang

¹²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 32 sebagaimana dalam Rambe, *Sarekat Islam...*, h. 25.

¹³⁰ PasarKreasi.com - The Largest Creative Market in Indonesia | <http://www.pasarkreasi.com> (diakses 9 Juli 2015).

¹³¹ *Ibid.*,

berbeda. Pertama adalah sistem pendidikan dari masa Islam yang diwakili dengan pondok pesantren seperti yang didirikan Nahdlatul Ulama, pendidikan bergaya barat yang disediakan oleh pemerintah Hindia-Belanda, dan terakhir pendidikan "swasta pro-pribumi" seperti Syarikat Islam dengan Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto, Taman Siswa, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa penjajah Belanda dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bagaimana ia menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan pendidikan lokal masyarakat yang sudah ada. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Pendidikan lebih dikhususkan pada anak-anak golongan priyayi. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penduduk yang lebih rendah status sosialnya dapat mudah ditundukkan karena pemerintah Belanda telah memegang golongan priyayi yang merupakan kaum elit. Secara tidak langsung, pengaruh Politik Etis terutama bidang pendidikan memberikan dampak positif bagi munculnya kaum pendidik dan pergerakan Indonesia.

2. Kondisi Pendidikan Islam Era Kolonial Belanda

Penggunaan istilah pendidikan Islam di sini untuk menyebut sedikitnya tiga dimensi; yakni dimensi kegiatan, dimensi kelembagaan,

dan dimensi pemikiran.¹³² Meski ketiga dimensi ini memiliki kandungan yang berbeda-beda, namun ketiganya memberikan petunjuk bahwa keberadaan pendidikan Islam masa kolonial Belanda di negara Indonesia ini berkembang dan mengalami masanya.

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam itu didorong oleh ajaran Islam yang didasari dengan kesadaran ummat Islam sendiri untuk membersihkan campur aduknya kehidupan agama dengan unsur-unsur lain, memperbaiki kualitas pendidikan, sosial dan ekonomi sebagai akibat dari penjajahan juga menghadapi aktivitas *Zending*.

Keberadaan organisasi-organisasi Islam tersebut melakukan aktivitas kegiatan; dengan klasifikasi: 1). membersihkan Islam dari pengaruh kebiasaan non-Islam, 2). reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, 3). reformasi pendidikan dan ajaran Islam, 4). mempertahankan Islam daripengaruh dan serangan dari luar, dan 5). melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Dan dari kelima klasifikasi ini, dapat disimpulkan: 1). memperbaharui dan menyempurnakan ibadah dan akhlak, 2). untuk mencapai kemerdekaan.¹³³

Perjuangan organisasi masa Islam mengenai pendidikan diwujudkan dalam sidang-sidang *volksraad* di masa pemerintahan kolonial Belanda para pemimpin dan tokoh-tokoh Islam telah memperjuangkan

¹³² Lihat penjelasan dalam Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), h. 105.

¹³³ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia* (Jogjakarta: Nida, t.th), h. 14 sebagaimana dalam Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam, Dirasah Islamiah III* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 97-98.

agar *godsdiert onderwijs* atau pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah umum.¹³⁴ Namun bukti sejarah mencatat bahwa, dengan penerapan “politik pecah belah” Belanda membuat aturan yang mengikat bagi pembukaan sekolah dan pendidikan Islam khususnya, yaitu: 1). Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Dari nasehat badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yakni *Guru Ordonantie 1905*, yang isinya bahwa orang Islam yang memberikan pengajaran atau pengajian Agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda; 2). Pada tahun 1925 dikeluarkan lagi peraturan yang lebih ketat terhadap PAI, yaitu tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda, melalui kebijakan *Guru Ordonantie 1925*; dan 3). Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda, dimana peraturan tersebut kemudian dikenal dengan nama *Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie)*.¹³⁵

Sehingga di era ini, nampak sangat berbeda antara sekolah umum (dibawah pemerintahan Belanda) dengan sekolah tradisional (bumiputera).

¹³⁴ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: CV. Amisisco, 1996), h. 64.

¹³⁵ Assegaf, *Politik Pendidikan...*, h. 40-41.

Dimana pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional berupa pesantren yang lebih menekankan pada aspek spiritualitas, yakni berpusat pada pembentukan *akhlak al-karimah*, ketaatan beribadah dan pengabdian kepada Allah, atau berdimensi *ukhrawi*, dan kurang membekali pengetahuan material peserta didiknya. Selain itu, pendidikan Islam era kolonial Belanda juga mengalami penekanan, tidak dapat tumbuh subur, tidak dapat berdiri tegak kuat, bahkan cenderung direndahkan.¹³⁶

Dari sini tergambar jelas bahwa, pendidikan Islam pada era kolonial Belanda sangatlah mengalami tekanan yang dahsyat. Namun, atas kegigihan dan semangat yang tinggi para pemuka agama (kiai) saat itu justru menjadikannya sebuah rasa yang mampu menumbuhkan inisiatif untuk mendirikan model sekolah diluar kebijakan kolonial Belanda, yang mana dalam memberi muatan pelajaran agama Islam menjadi lebih banyak.¹³⁷ Ditinjau dari konteks sosial-politik saat itu, banyaklah bermunculan ormas-ormas Islam seperti Jami'at Khair (1905), Muhammadiyah (1912), Serikat Islam (1913), al-Irsyad (1913), Nahdhatul Ulama (1926), dan lain sebagainya, yang nyata-nyata bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islam.¹³⁸

¹³⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 24 sebagaimana dikutip Assegaf, *Politik Pendidikan...*, h. 48.

¹³⁷ Assegaf, *Politik Pendidikan...*, h. 188.

¹³⁸ *Ibid.*, h. 114.

3. Kondisi Pendidikan Islam Dewasa Ini

Pada umumnya sistem pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan berbagai tantangan, baik tantangan *internal* (nasional) maupun tantangan *eksternal* (globalisasi).¹³⁹ Pengertian globalisasi sendiri memiliki makna yang berbeda-beda, namun secara prinsip mengandung maksud terjadinya pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama diseluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi yang akan mengakibatkan berbagai dampak positif maupun negatif.¹⁴⁰

Berkaitan dengan dunia pendidikan, maka tantangan yang berasal dari *internal* adalah sistem pendidikan Islam yang berjalan semakin jauh menyimpang dari cita-cita semula yaitu mengembangkan sifat-sifat pendidikan yang rasional, demokrasi. Dimana pada dasarnya sistem pendidikan yang sekarang berjalan belum meliputi berbagai aspek kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tantangan *eksternal* adalah sistem nasional yang ketinggalan zaman, dalam arti tidak mengikuti perkembangan. Sistem yang berlaku baik dari proses operasional pendidikan dikelola secara sentralistik yang mana segala sesuatunya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat padahal

¹³⁹Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), h. 31 dalam Mansur, *Sejarah Sarekat...*, h. 161.

¹⁴⁰A. Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 20 dalam *Ibid.*, h. 161.

tuntutan globalisasi adalah desentralisasi atau otonomi pada pendidikan itu sendiri, sehingga akan mudah menyalurkan kebutuhan daerah setempat.¹⁴¹

Meski digembar-gemborkan tentang sistem pendidikan yang otonom, namun nyatanya sistem pendidikan yang berlaku sekarang ini juga mengandung faktor diskriminasi, karena pada dasarnya sekolah-sekolah yang berdiri di masyarakat baik dalam naungan pemerintah maupun swasta yang dikelola oleh masyarakat masih juga dikelompokkan dalam kategori terdaftar, diakui, dan disamakan. Maka dalam posisi demikian, sekolah swasta (termasuk mayoritas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam) lebih merakyat dan lebih murah dari pada sekolah negeri. Sehingga dampaknya akan rendah bagi mutu, karena minimnya dana, sarana dan perhatian dari pemerintah yang kurang memusatkan pada lembaga pendidikan swasta tersebut.¹⁴²

Atas persoalan tersebut, menjadi penting disini untuk mengelola pendidikan Islam yang secara kekinian sedang mengalami pergerakan dan pergeseran atas meluasnya bidang globalisasi. Manajemen yang diperlukan bagi pendidikan Islam saat ini diantaranya adalah menyiapkan lembaga secara matang melalui: perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan.

Memang, pekerjaan ini tidaklah mudah dan cepat untuk dilakukan, namun paling tidak jika dipersiapkan sedini dan sedemikian rupa, akan menjadikan sekolah atau madrasah yang memberikan pelajaran pendidikan

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 162.

¹⁴² *Ibid.*, h. 162-163.

Islam akan siap dan sanggup menghadapi dan mengikuti perkembangan globalisasi (yang secara spesifik tertumpu pada perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi).

Sebaliknya, apabila pendidikan Islam di sekarang ini tidak di manaj dengan baik, maka ketertinggalan dan kelambanan penguasaan ilmu pengetahuan (duniawi) akan jauh dari yang lainnya. Namun bukan berarti bahwa penguasaan atas segala kemajuan ilmu pengetahuan umum saja cukup; justru pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat didaya gunakan bagi penanaman ilmu agama Islam.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 122:¹⁴³

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : *Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.*

Menggaris bawahi kata pergi dan memperdalam ilmu pengetahuan atas kandungan ayat tersebut, merupakan bagian dari manajemen yang semestinya disaat sekarang ini diperlukan untuk memberikan peringatan bahwa menerapkan ilmu pengetahuan memang penting; namun tidak kalah penting pula bahwa menguasai segala pergeseran dan perkembangan atas

¹⁴³ Hatta, *Tafsir Qur'an...*, h. 206.

ilmu pengetahuan yang sedang bergerak ini pula menjadi hal yang menentukan keberhasilan bagi pendidikan itu juga.

Menjadi semakin jelas bahwa bagi tiap-tiap kita agar mampu menguasai berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; yang pada akhirnya diharapkan pandai pula untuk mengolah pendidikan Islam itu sendiri. Sehingga, tiap-tiap generasi yang telah purna mengenyam pendidikan akan mampu memiliki kompetensi sesuai bakat keahliannya dan juga tetap memiliki dasar keagamaan (tauhid) yang kuat.

Bukan sebaliknya, setiap peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan setelah keluar memperoleh ilmu yang dimiliki secara individu dan siap dijual untuk mencari uang dan bukan menjadikan dirinya sebagai ilmuan yang peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa dan negara; melainkan condong terhadap sifat materialistis.¹⁴⁴

4. Posisi Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional merupakan pusaran pendidikan yang ada di Indonesia. Dimana bagi segenap pendidikan yang ada di Indonesia dirumuskan dan dioperasionalkan secara sentralistik oleh pemerintah pusat melalui kementerian. Tak terkecuali bagi sekolah negeri maupun swasta (yakni madrasah) juga merasakan imbas dari sentralisasi sistem pendidikan ini. Tentunya juga bagi sekolah atau madrasah yang memuat pelajaran pendidikan Islam turut serta merasakan sistem pendidikan nasional ini.

¹⁴⁴ Mansur, *Sejarah Sarekat...*, h. 164.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.¹⁴⁵ Maka pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar dari tradisi Islam sendiri, sehingga dalam implementasinya tidak mungkin ditangani secara sekuler. Pemerintah juga memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik bagi pendidikan Islam sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kedudukan dan orientasinya sama.¹⁴⁶

Bagi pendidikan Islam yang secara substansi memiliki tujuan khusus, juga tidak bisa memisahkan diri dari Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian yang harus juga memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang ini di Indonesia, dari awal hingga akhir telah diatur oleh pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (sentralistik). Meski disisi lain pula, diberikannya otonomi yang dirasa mungkin untuk dikembangkan oleh sekolah/madrasah sesuai dengan kultur budaya, agama dan geografisnya masing-masing.

Dan, pemerintah sebagai pemegang kuasa pembangunan nasional harus sungguh-sungguh dan cerdas agar tetap sesuai dengan jati diri

¹⁴⁵ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 101 dalam Mansur, *Sejarah Sarekat...*, h. 166.

¹⁴⁶ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 148 dalam *Ibid.*, h. 167.

bangsa Indonesia. Pengembangan pendidikan nasional harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.¹⁴⁷

Maka dari itu, manajemen pendidikan Islam sangat perlu untuk disusun dan diatur sedemikian rupa agar semua yang terkandung didalam tujuan pendidikan Islam akan mampu bersanding bersama pendidikan nasional. Selain itu juga, pendidikan Islam akan mampu bersaing secara global dalam kancah internasional.

Wujud manajemen pendidikan Islam dalam pendidikan nasional telah ditunjukkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dimana di dalamnya mensejajarkan posisi madrasah dengan sekolah umum. Maka sudah sewajarnya Kementerian Agama memiliki program-program yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dalam manajemen pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Dan untuk dapat bersanding dan bersaing secara kualitas dengan sekolah umum, maka madrasah (lembaga pendidikan Islam) diantaranya dapat menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBS).¹⁴⁸ Meski demikian, bukan berarti bahwa dalam penelitian ini menetapkan solusi pendidikan Islam dalam melaksanakan manajemen mengharuskan dengan MBS; namun lebih penulis tekankan pada bagaimana tiap-tiap pendidikan Islam mampu memilih dan menentukan manajemen yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah.

¹⁴⁷ B. Sudiby, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi* (Jakarta: Imperial Bhakti Utama, 2009), h. tt dalam Hartono, *Pendidikan Integratif* (Purwokerto: STAIN Press, 2011), h. 1.

¹⁴⁸ Mansur, *Sejarah Sarekat...*, h. 183.

Manajemen yang diterapkan semestinya juga akan mampu memanfaatkan kebijakan peraturan dan perundang-undangan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan sistem pendidikan dari pemerintahan sentralistik ke desentralistik atau otonomi pemerintahan daerah (otoda), yakni dengan dilakirkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; namun demikian pemerintah baik pusat maupun daerah hanya berperan sebagai *funding agency*, pemicu dana, untuk selanjutnya sekolah sendiri (termasuk pendidikan Islam) yang mengembangkannya. Perhitungan dana pendidikan harus selalu berorientasi pada pendidikan dan perhitungannya harus bertolak dari kebutuhan belajar per-murid aktif belajar, bukan jumlah murid terdaftar secara resmi, dan bukan pula menurut jumlah sekolah.¹⁴⁹

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berkait dengan penelitian ini, menjadi penting untuk penulis sampaikan beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian yang memiliki kedekatan topik kajian dengan judul yang penulis angkat. Diantaranya adalah penelitian H.A R. Tilaar yang menitik beratkan pada pendidikan dalam pembangunan nasional;¹⁵⁰ dimana dalam rangka menyongsong abad xxi yang ditandai dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 182.

¹⁵⁰ Lihat H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

maka segala perihal yang berhubungan dengan pendidikan diperlukan dasar dan perancangan pendidikan yang mapan sehingga tercapai kualitas manusia Indonesia.

Berkaitan dengan manajemen, Edward Sallis memberikan gambaran melalui hasil penelitiannya bahwa mutu pendidikan tidak hanya ada dalam institusi industri bisnis belaka, melainkan juga menjadi kebutuhan institusi pendidikan. Hal ini ditunjukkan agar institusi pendidikan mampu bertahan dalam dunia persaingan yang sangat kompetitif, serta mampu mendidik akademisi-akademisi dengan reputasi yang positif. Sejatinya, mutu sudah menjadi bagian dari semua institusi--termasuk institusi pendidikan; maka manajemen memerlukan pendekatan yang realistis dan mudah dilaksanakan, hanya membangun mutu yang sudah ada tersebut dan mengembangkannya secara terus-menerus.¹⁵¹ Berkait manajemen dalam pendidikan, dijelaskannya melalui 4 (empat) pilar TQM dalam pendidikan, yaitu: 1). Hubungan yang sinergi (adanya kerjasama kelompok atau kolaborasi); 2). Perbaikan terus menerus (yakni diawali dari evaluasi diri hingga institusi); 3). Adanya sistem dari proses yang berkelanjutan (artinya semua komponen sekolah saling mempengaruhi dan ketergantungan); dan 4). Kepemimpinan (yakni sentral pada seorang pemimpin dan juga komitmen para pemimpin dalam satu organisasi).

Adapun beberapa hasil penelitian yang memiliki kedekatan pembahasan dengan konsepsi pendidikan H.O.S Cokroaminoto, diantaranya

¹⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h. 28-29.

hasil penelitian Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku *Api Sejarah (jilid 1 dan 2)*;¹⁵² yang mengungkapkan bahwa salah satu tokoh pemikir dan pergerakan kebangkitan kemerdekaan adalah H.O.S Cokroaminoto dengan menjadikan rumah tinggalnya sebagai tempat belajar para calon pemimpin besar dibangsa ini. Sehingga ada yang memberikan julukan kepadanya sebagai Guru Sang Proklamator.

Amelz dengan bukunya yang berjudul *H.O.S Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya (jilid 1 dan 2)*,¹⁵³ disini lebih luas membicarakan kecakapan sang tokoh H.O.S Cokroaminoto baik dalam kancah nasionalisasi, demokratisasi kebangsaan berdasar pada ajara Islam; termasuk juga membahas tentang pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang *Moeslim National Onderwijs*.

Wildan Yahya-Munawar Rahmat dengan bukunya yang berjudul *Tauhid, Ilmu, dan Siasah (Landasan Prinsip Perjuangan Syarikat Islam)*,¹⁵⁴ berisikan tentang uraian dari program-asas dan program-tandhim yang semestinya menjadi bahan acuan dan pijakan bagi berbagai aspek sendi kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan.

¹⁵² Ahmad Mansur Suryanegara adalah seorang pengajar yang telah berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Dari mulai SMP Muslimin Bandung hingga menjadi dosen diberbagai perguruan tinggi diantaranya UNPAD, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lainnya. Beliau juga seorang pergerakan seperti Pelajar Islam Indonesia hingga menjadi pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jawa Barat. Lebih lengkap tentang beliau, dapat baca di buku karyanya yang berjudul *Api Sejarah, jilid 1 dan 2*, Salamadani, Bandung, 2012.

¹⁵³ Lihat Edward Sallis, *Total Quality Managemen In Education* yang dialih bahasakan oleh Ahmad Ali Riyadi-Fahrurrozi (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012).

¹⁵⁴ Lihat Wildan Yahya-Munawar Rahmat, *Tauhid, Ilmu, dan Siasah: Landasan Prinsip Perjuangan Syarikat Islam* (DPC Syarikat Islam Banjarnegara, 1989).

Muljono-Sutrisno Kuntoyo dengan hasil penelitiannya yang berjudul *Haji Samanhudi*,¹⁵⁵ mengungkap keabsahan para Pahlawan Nasional untuk menjadi suri-tauladan bagi generasi penerusnya; serta dijelaskan pula bahwa Syarikat Islam merupakan pergantian nama dari Syarikat Dagang Islam (atau SDI). Yang pada awalnya Syarikat Dagang Islam (SDI) dipimpin oleh Haji Samanhudi, lantas tongkat estafet kepemimpinan SDI dipertaruhkan dipundak H.O.S Cokroaminoto yang kemudian berganti nama dengan Syarikat Islam (sering disebut dengan SI). Dan diterangkan pula dalam buku ini berbagai langkah pergerakan awal yang disebut gerakan rakyat. Hal ini sebagai bentuk pergerakan dalam rangka mencari kemerdekaan yang seutuh-utuhnya.

Mansur dengan hasil penelitiannya tentang *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*,¹⁵⁶ banyak menemukan catatan-catatan penting mengenai pendidikan kebangsaan dalam Sarekat Islam (SI). Diantaranya mengenai betapa pentingnya pendidikan Islam menurut SI yang didalamnya menguak perihal pendidikan Islam sebagai paradigma pembebasan dan proses penyadaran. Juga membicarakan tentang prinsip pendidikan SI serta tahapan dan sistem pendidikan SI.

Dan tentunya masih banyak lagi penelitian dan atau kajian lain mengenai perihal tersebut. Oleh karena keterbatasan diri penulis, maka penelitian-penelitian yang lainnya belum dapat disebutkan pada kesempatan ini. Sehingga demikian, penulis beranggapan bahwa penelitian yang khusus meneliti *Pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang Moeslim National*

¹⁵⁵ Lihat Muljono-Sutrisno Kuntoyo, *Haji Samanhudi* (Jakarta: Depdikbud, 1980).

¹⁵⁶ Mansur, *Sejarah Sarekat...* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. xiii-xv.

Onderwijs dan Implikasinya dalam Manajemen Pendidikan Islam ini tidaklah akan sama dari penelitian-penelitian sebelum dan atau penelitian lainnya; karena penelitian ini menfokuskan pada pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang pendidikan seorang muslim yang berkebangsaan.

F. Kerangka Teori

Teori dalam disiplin sejarah biasanya dinakan “kerangka referensi” atau “skema pemikiran”.¹⁵⁷ Dan teori itu sendiri, dipandang sebagai bagian pokok ilmu sejarah, ialah apabila penulisan atas suatu peristiwa itu sampai kepada upaya melakukan analisa atas faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.¹⁵⁸

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan *historis*, maka berdasarkan uraian dan penjelasan teori sebagaimana di atas, diperlukanlah adanya kerangka teori. Dan kerangka teori diperlukan agar penelitian ini terarah dan terukur, serta sebagai pijakan dalam memantapkan pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang *Moestlim National Onderwijs* dan implikasinya dalam manajemen pendidikan Islam.

1. Pendidikan masa kolonial Belanda

Potret keadaan pendidikan masa kolonial Belanda diperlukan dalam penelitian ini, sebagai dasar umum melihat keadaan pendidikan.

¹⁵⁷ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 28.

¹⁵⁸ Sartono Kartodidjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), h. 2., sebagaimana dikutip *Ibid.*, h. 29.

Meski uraian tentang hal ini cukup singkat, namun paling tidak mampu memberikan gambaran bahwa pendidikan dimasa tersebut sangat dominan akan kepentingan kaum-kaum tertentu; terutama kolonial Belanda dan antek-antek yang memanfaatkan situasi demi kepentingannya sendiri. Selain itu, kebanyakan dari orang pribumi yang memiliki kemampuan lebih, oleh koloni dijadikan pegawai atau buruh bagi kelancaran dan kelanggengan penjajahan. Perihal ini, termasuk juga diskriminasi dan penyempitan pengetahuan keilmuan menjadi bukti sejarah yang diakui oleh banyak orang.

2. Kondisi Pendidikan Islam Era kolonial Belanda

Tak beda dengan nasib pendidikan masa penjajahan Belanda, bahwa banyak sejarawan menuliskan fakta bahwa kondisi pendidikan Islam di masa tersebut juga telah mengalami pendangkalan dan penyempitan. Sehingga masa itu, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan yang syarat akan muatan pendidikan Islam. Jikapun ada lembaga atau yang sejenis, mereka hanya bermuara konsep pendidikan ke-Islam-an yang tradisional. Yakni muatan dan sistem pendidikannya hanya untuk menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam semata.

Wujud pendidikan masa kolonial Belanda diantaranya adalah pengajian, pesantren, dan kegiatan pengajaran dasar ke-Islam-an. Hal ini menjadikan kaum pribumi tidak memperoleh kemerdekaan akan

penguasaan Islam yang sejati, tidak dapat diperoleh dengan mudah dan luas. Terlebih lagi, penguasaan akan hal kemerdekaan berkebangsaan.

3. Pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang *Moelism National Onderwijs*

Dari sekian banyaknya tokoh Islam di Indonesia yang berpegang teguh terhadap kepentingan agama dan negara, adalah beliau *Jang Oetama* Hadji Oemar Siad Tjokroaminoto (sebutan tenar sekarang H.O.S Cokroaminoto). Bahwa dari sekian banyaknya pemikiran beliau, diantaranya adalah menyoroti penindasan pendidikan oleh kolonial Belanda. Sehingga, fakta-fakta sejarah menyebutkan bahwa kegigihannya dalam menumbuhkan semangat pergerakan nasional menjadikan Hindia Belanda merdeka menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud ketokohnya bagi bangsa ini.

Melalui pemikiran yang disampaikan dalam kongres di Jogjakarta; memberikan bukti bahwa beliau juga konsen terhadap para generasi kaum pribumi yang semestinya mengenyam pendidikan keduniaan serta keagamaan seluas dan setinggi-tingginya. Dengan tujuan, dasar, prinsip, dan langkah-langkah yang dimuat dalam konsepnya tersebut, menjadikan generasi bangsa nantinya merdeka dalam menuntut ilmu keduniaan dan keagamaan. Untuk menjadikan tujuan itu tercapai, maka dalam geraknya H.O.S Cokroaminoto mendasarkan pada tiga pilar utamanya, yaitu *sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasyah*.

4. Implikasi Pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang *Moelism National Onderwijs* dalam manajemen pendidikan Islam

Berdasar pada teroi-teori tentang manajemen pendidikan Islam di atas, maka implikasi atas *Moelism National Onderwijs* disini adalah mengurai pada lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Khususnya implikasi pada lembaga-lembaga dibawah organisasi Syarikat Islam (baik yang berupa yayasan pendidikan, pesantren, maupun lembaga dakwah lainnya). Secara khusus, implikasi dari atas *Moelism National Onderwijs* disini adalah pada lembaga pendidikan formal dibawah naungan organisasi induk, yakni Syarikat Islam. Didalamnya akan menguraikan manajemen pendidikan Islam, yang dapat dikolaborasikan dengan pemikiran utama dari *Moelism National Onderwijs*. Oleh karena itu, penentuan visi, misi, dasar, tujuan, prinsip dan langkah-langkah dalam manajerialnya dituangkan dalam empat bentuk, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Implikasi dari konsep ini secara general (umum) diletakkan pada lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah dibawah naungan organisasi induk Syarikat Islam. Diantaranya adalah dilaksanakan pada Yaysan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pondok pesantren, majelis taklim, dan lainnya.